

**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM  
MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN  
(STUDI KASUS DI SDN 1 JETIS LOR KECAMATAN  
NAWANGAN KABUPATEN PACITAN)**

**TESIS**



**Oleh:**

**AHMAD AFATUR RHOMAN**

**NIM 502180060**

**PROGRAM MAGISTER**

**PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PONOROGO**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Ahmad Afatur Rhoman**, NIM 502180060, dengan judul: "*Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi Kasus Di Sdn 1 Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)*" maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munâqashah Tesis.

Ponorogo, 05 November 2020

Pembimbing,



**Dr. Mukbat, M.Ag**  
NIP. 197311062006041017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jl. Premuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.iaipn.ponorogo.ac.id](http://www.iaipn.ponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana\\_iaipn.ponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana_iaipn.ponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Afatur Rhoman, NIM 502180060, Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan judul "Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi Kasus Di Sdn 1 Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)" telah dilakukan ujian tesis dalam bidang majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, 02 Maret 2021 dan dinyatakan LULUS.

**Dewan Penguji**

| No | Nama Penguji   | Tanda tangan | Tanggal    |
|----|--|--------------|------------|
| 1. | Dr. Abid Rohmanu, M.H.I<br>NIP. 197602292008011008<br>Ketua Sidang         |              | 21/04 2021 |
| 2. | Dr. Moh. Miftachul Choiri, M.A<br>NIP. 197404181999031002<br>Penguji Utama |              | 21/04 2021 |
| 3. | Dr. Mukibat, M.Ag<br>NIP. 197311062006041017<br>Pembimbing/Penguji 2       |              | 21/04 2021 |

Ponorogo, 02 Maret 2021  
Direktur Pascasarjana,

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  
NIP 197605172002121002

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Afatur Rhoman  
NIM : 502180060  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : -  
Judul Tesis : Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dalam  
Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi  
Kasus Di Sdn 1 Jetis Lor Kecamatan  
Nawangan Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2021  
Yang membuat pernyataan,

  
**AHMAD AFATUR RHOMAN**  
NIM. 502180060

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Ahmad Afatur Rhoman**, NIM 502180060, **Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi Kasus Di Sdn 1 Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 04 November 2020  
Pembuat Pernyataan,



**Ahmad Afatur Rhoman,**  
**NIM 502180060**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kualitas sebuah negara dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya alam tidak dapat terpisah dari pendidikan.

Pendidikan adalah upaya menciptakan manusia Indonesia kearah kemajuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia nomor 20 tahun 2003 (UU Sisdiknas) Bab I pasal 1 yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya menyangkut bangsa dan negara. Penjelasan yang

disampaikan di atas mengamanatkan pentingnya pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia.<sup>1</sup> Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Melalui perencanaan strategik di bidang pendidikan, lembaga pendidikan mampu menyiapkan output.<sup>2</sup>

Menurut Marxisme proses pendidikan merupakan proses yang memberikan kekuatan kepada individu untuk melawan kekuatan yang membatasi perkembangannya yang diatur oleh kekuatan ekonomi kelompok yang berkuasa atau kelompok kapitalis. Ada pula pandangan manusia yang melihat manusia itu tidak dapat berdiri sendiri tetapi hanya dapat *survive* di dalam kehidupan bersama dalam masyarakatnya.<sup>3</sup>

Menurut Sagala, sekolah yang berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikannya ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: (1) Perumusan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah (2) Evaluasi Diri Sekolah (3) Peranan kepala sekolah (4)

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 bab 1 pasal 1 tentang Standar Nasional Pendidikan

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan.

<sup>3</sup>Ibid, 30.



Peningkatan Mutu Guru.<sup>4</sup> Indikator keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan berdampak dari berbagai aspek, yaitu: (1) Efektifitas proses pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan(*transfer Knowledge*) maupun penguatan, melainkan lebih menekankan pada internalisasi tingkatan aspek kognitif, afektif dan psikomotor dan kemandirian, (2) kepemimpinan kepala sekolah hendak mendesak terwujudnya visi, misi, tujuan target lewat program yang dilaksanakan secara berencana, bertahap, kreatifitas, inovasi, efisien, memiliki keahlian manajerial, (3) pengelolaan tenaga kependidikan yang efisien, (4) sekolah mempunyai budaya kualitas, (5) sekolah mempunyai team work yang kompak, pintar serta dinamis. Sebab output pembelajaran ialah hasil kolektif bukan hasil orang guna mendapatkan kualitas yang kompetitif, (6) sekolah mempunyai kemandirian, ialah keahlian buat bekerja secara optimal dengan tidak bergantung petunjuk dari atasan serta mempunyai sumber energi manusia yang potensial, (7) partisipasi masyarakat sekolah serta warga. Keterkaitan serta keterlibatan pada sekolah wajib besar dilandasi oleh rasa tanggungjawab lewat loyalitas serta pengabdian bagaikan *steakholders*, (8) sekolah mempunyai transparansi, (9) sekolah

---

<sup>4</sup>Syaiiful Sagala, “Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2010): 110.

mempunyai keinginan pergantian (*management change*). Pergantian merupakan kenaikan bermakna positif buat lebih baik dalam kenaikan kualitas pembelajaran, (10) sekolah melaksanakan penilaian revisi yang berkelanjutan serta ialah proses penyempurnaan dalam tingkatan kualitas totalitas, mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur serta sumber energi manusia, (11) sekolah mempunyai akuntabilitas bagaikan tanggung jawab terhadap keberhasilan program sekolah yang sudah dilaksanakan, (12) output sekolah penekanannya kepada lulusan yang mandiri sertaenuhi ketentuan pekerjaan (*qualified*).<sup>5</sup>

Dalam meningkatkan mutu Pendidikan tidak luput dari komponen Pendidikan, yang memiliki wewenang paling tinggi dalam pengambilan keputusan suatu Lembaga Pendidikan adalah kepala sekolah. Peran Kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru di sekolah. Beberapa peran kepala sekolah sebagai *leader* adalah kepala sekolah harus mampu menolong stafnya memahami tujuan bersama yang ingin dicapai, bertukar pendapat dengan staffnya dalam menetapkan tujuan pendidikan, menciptakan semangat kerja yang tinggi,

---

<sup>5</sup>*Ibid*, 172.

menyenangkan, aman dan penuh semangat.<sup>6</sup> Selain itu, peranan kepala sekolah sebagai pemimpin mampu menyelesaikan masalah ini sesuai dengan peranannya. Menurut Hick delapan kepemimpinan (*Leadership Functions*), yaitu: adil, memberi sugesti, mendukung tercapainya tujuan sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi, dan yang terakhir bersedia menghargai.<sup>7</sup>

Selain peran kepala sekolah salah satu dari unsur penting dalam penyelenggaraan Pendidikan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 yang berisi tentang kenyataan bahwa sumber pembiayaan dalam pendidikan dapat diperoleh melalui pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing, dan sumber lain yang sah. Disisi lain, otonomi kebijakan dalam sebuah lembaga menjadi penentu kebijakan pembiayaan pendidikan. Maka dari itu perlu adanya struktur anggaran dan organisasi yang jelas untuk mencapai visi dan misi lembaga. Aspek kebijakan pendidikan yang berkaitan banyak hal meliputi visi manajemen dan proses pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan lembaga maka dibutuhkan sistem pendidikan Nasional yang Demokratis,

---

<sup>6</sup> Soewadji Lazaruih, *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*, (Jakarta: Kanisius, 1992): 60-61.

<sup>7</sup>*Ibid.*,106.

Desentralisasi dan Berorientasi pada kemajemukan, semua itu tercermin diantaranya dalam pemerataan dan aksesibilitas kesempatan pendidikan.<sup>8</sup>

Pada proses berjalannya Pendidikan tidak terlepas dari masalah-Masalah yang dapat menghambat berjalannya pendidikan misalnya, pembiayaan merupakan salah satu masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan khususnya dalam hal biaya pendidikan sampai saat ini, biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau disebabkan oleh karena hal yang lainnya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekalipun Pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus

---

<sup>8</sup>Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012): 24.

ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD R.I Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya.

Selain permasalahan pembiayaan dari pihak peserta didik, juga ada permasalahan pembiayaan dari pihak guru/pendidik. Dapat kita ketahui bahwa guru/pendidik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pasti setiap bulannya sudah terjamin dari pemerintah akan tetapi bagi guru/pendidik yang berstatus sebagai guru GTT/honorer yang mendapat gaji setiap bulannya tidak seberapa yaitu sekitar RP. 200.000,00-RP.300.000,00 setiap bulannya. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya sedangkan waktu setiap harinya mereka gunakan di sekolah. Maka dari pihak sekolah juga harus memikirkan kesejahteraan guru/pendidik. Sehingga jika seluruh kesejahteraan guru/pendidik dan peserta

didik terpenuhi, akan tercipta proses Pendidikan yang baik serta etos kerja guru yang baik pula.<sup>9</sup>

Terkait dengan model pembiayaan pendidikan, Amhar dikutip oleh Wibisono berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) model pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi; 2) pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu; 3) pendidikan gratis diberikan sampai SMA, dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi; dan 4) semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Penggalan sumber dana dapat diperoleh dari upaya kerja sama dengan industri atau memanfaatkan bantuan CSR (corporate social responsibility), membentuk komunitas alumni, atau bersumber dari orangtua/wali peserta didik.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 1 Jenis Lor, permasalahan pembiayaan Pendidikan dari peserta didik dan permasalahan pembiayaan Pendidikan dari kesejahteraan guru honorer masih menjadi PR bagi Lembaga pendidikan. Menurut Pujiono, S.Pd selaku kepala sekolah

---

<sup>9</sup> Observasi awal, tanggal 6 Oktober 2019.

<sup>10</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing, 2007): 16.

mengungkapkan bahwa untuk menuntaskan permasalahan pembiayaan Pendidikan yang malah bagi peserta didik dan meningkatkan kesejahteraan guru serta etos kerja melibatkan pihak luar sekolah yaitu orangtua siswa. Hal ini bertujuan agar mutu pembelajaran sesuai dengan visi, misi sekolah serta kepuasan orangtua siswa. Adapun cara dalam meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan mengadakan ekstrakurikuler dan jam tambahan pelajaran siswa untuk menjaga mutu pembelajaran. Permasalahan sekolah terkait pembiayaan diselesaikan bersama oleh kepala sekolah melalui pengadaan kebijakan dengan melibatkan orangtua.<sup>11</sup>

Hasil dari penjajakan awal, telah ditemukan *social situation* yang bisa dijadikan sebagai model *problem solving* dari masalah diatas. *Social situation* yang dimaksud adalah 1) kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan guru dan masyarakat di SDN 1 Jetis Lor dalam membuat kebijakan pendidikan. 2) Kepala Sekolah mengadakan pertemuan sekolah untuk menunjang partisipasi masyarakat dan orang tua siswa SDN 1 Jetis lor.

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mengungkap “**Kebijakan Pembiayaan**

---

<sup>11</sup> Pujiono, Kepala Sekolah “Observasi Pelaksanaan kebijakan, di Ruang Kepala Sekolah, *observasi*, tanggal 6 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

# **Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi Kasus di SDN 1 Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)”**

## **B. Masalah dan Rumusnya**

Berdasarkan dari situasi sosial (*socialsiutation*) diatas, masalah dan rumusnya yang akan dicari jawabanya oleh peneliti ini dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SDN 1 Jetis Lor?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SDN 1 Jetis Lor?
3. Bagaimana evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Yang diperoleh di SDN 1 Jetis Lor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SDN 1 Jetis Lor.



2. Untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SDN 1 Jetis Lor.
3. Untuk menjelaskan evaluasi Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Yang diperoleh di SDN 1 Jetis Lor.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka hasil penelitian diharapkan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Seorang guru harus memiliki kode etik guru. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku bagi guru sebagai bagian dari PGRI yang bertujuan sebagai berikut: (1) Menjunjung tinggi martabat profesi guru; (2) Meningkatkan kesejahteraan guru; (3) Meningkatkan pengabdian guru dalam pembangunan bangsa dan negara indonesia; (4) Meningkatkan profesionalitas guru; (5) meningkatkan kewibawaan guru didalam tugasnya dan didalam pergaulannya di masyarakat; (6) Menjaga citra pendidikan indonesia; (7) Menjadisuri tauladan bagi peserta didik dan

wargamasyarakat dan (8) Meningkatkan wawasan dan karier guru yang menjanjikan kehidupannya dimasa yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Guru, sebagai informasi dan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja Guru supaya lebih baik lagi.
- b. Bagi Kepala Sekolah atau pengelola pendidikan, dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan mutu pendidikan. Bagi Sekolah, dapat menciptakan kinerja yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
- c. Bagi Masyarakat, dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam peran kepala sekolah di lingkungan sekolah.

## E. Kajian Terdahulu

Dalam kaitannya dengan objek penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Costan Sedik dengan judul skripsi “*Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia*” dengan tujuan untuk menggambarkan Kebijakan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Ada pula hasil dari studi ini yakni Pengembangan sumber daya manusia dititikberatkan pada

Pengembangan Pegawai di Dinas Pendidikan dengan: a) adanya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi bersumber pada analisa kebutuhan, hasil penilaian kinerja, assessment maupun pengembangan karir. b) Study lanjutan telah dilakukan oleh guru- guru Pegawai Sipil dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau serta dibiayai oleh Pemerintah Wilayah Kabupaten Tambrau. Dalam pengembangan kompetensi teknis fungsional dicoba buat tingkatkan ketrampilan (*Skill*) karyawan buat menunjang kinerja dibidang tugasnya. Pelaksanaanya yakni: 1) Seminar telah dilaksanakan serta diiringi oleh Kepala Sekolah guna tingkatkan kualitas pembelajaran serta guru di sekolah tiap-tiap. Sehingga harapannya dengan tingkatkan kualitas guru serta siswa hingga sekolah tersebut memperoleh akreditasi yang baik serta siswa memperoleh hasil yang memuaskan pada Tes Nasional. 2) Penerapan Training/Pelatihan sertifikat sangat bagus dilaksanakan tiap organisasi tercantum Dinas Pembelajaran Tambrau. Paling utama guru- guru sekolah supaya kualitas pembelajaran lebih ditingkatkan. 3) Lokakarya telah terlaksana dengan baik di Dinas Pembelajaran dengan mengaitkan guru-guru dalam membuat rancangan kurikulum supaya kualitas pembelajaran serta pengembangan sumber energi manusia di Kabupaten Tambrau bisa lebih ditingkatkan. 4) Study banding

dilaksanakan dengan tujuan tingkatan kualitas kerja guru supaya produktivitas sekolah cocok dengan tuntutan kemajuan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi.<sup>12</sup>

Kedua, Jaleha, dengan judul tesis *“Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Mempraktikkan Pembelajaran Kepribadian Siswa Di MTs Muhammadiyah I Tlogomas Kota Malang”*. Tujuan riset ini yakni: 1) Implementasi Kebijakan sekolah dalam Mempraktikkan Pembelajaran Kepribadian. 2) faktor- faktor pendukung serta hambatannya. 3) upaya- upaya buat menanggulangi faktor- faktor hambatan dalam mempraktikkan Pembelajaran Kepribadian siswa di MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang. Dari hasil riset ini bisa disimpulkan kalau: 1) Implementasi kebijakan dalam mempraktikkan pembelajaran kepribadian siswa dengan (a) Perencanaan, (b) Penerapan, (c) Penilaian penguatan pembelajaran kepribadian sudah terlaksana dengan baik dengan terdapatnya pengimplementasian nilai- nilai. Penanaman kepribadian yang belum terlasana dengan baik masi membutuhkan proses buat memantapkan pembelajaran kepribadian lebih lanjut. 2) faktor- faktor pendukung serta

---

<sup>12</sup> Costan Sedik, “Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017):2.

hambatan- hambatan mempraktikkan pembelajaran kepribadian yakni (a) Kurang optimalnya pengontrolan guru terhadap aktivitas ekstrakurikuler di sekolah, (b) Penguatan pembelajaran kepribadian (PPK) guru BK, namun belum membuat pembukuan yang akurat serta perinci terpaut pelanggaran-pelanggaran siswa disekolah, (c) Terdapatnya miskomunikasi antara orangtua siswa dengan guru dalam menanamkan nilai-nilai kepribadian terhadap siswa. 3) Upaya- upaya yang telah dicoba oleh pihak sekolah buat menanggulangi faktor- faktor hambatan dalam mempraktikkan pembelajaran kepribadian siswa di MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Malang ialah: (a) Pihak sekolah membuat jadwal penilaian tiap 6 bulan serta 1 tahun sekali, (b) Melaksanakan penguatan pembelajaran kepribadian lewat aktivitas ekstrakurikuler di sekolah, (c) Guru mempraktikkan tata cara role model untuk siswa semacam, melaksanakan solat berjama'ah, melindungi kebersihan area sekolah serta sopan santun.<sup>13</sup>

Ketiga Moch. Sulton Rachmandhani judul Tesis "*Model Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ponorogo*"

---

<sup>13</sup>Jaleha, "Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Mempraktikkan Pembelajaran Kepribadian Siswa Di MTs Muhammadiyah I Tlogomas Kota Malang" (Tesis IAIN Ponorogo, 2016): 9.

Dengan tujuan penelitian buat mendeskripsikan: 1) Proses formulasi kebijakan Kepala Sekolah dalam pengembangan kualitas pembelajaran disekolah dasar muhammadiyah 1 ponorogo lewat 4 tahapan proses formulasi kebijakan ialah: (a) Identifikasi kebijakan, (b) Penataan jadwal kebijakan, (c) Membuat proposal kebijakan, (d) Pengesahan rumusan kebijakan. 2) Penerapan kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar Muhammadiyah telah berjalan secara baik serta memperoleh hasil yang cocok harapan sekolah secara jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Dengan terlaksananya Model Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ponorogo terdapat pula pemicu kebijakan-kebijakan ini tidak berjalan dengan baik karna terdapatnya aspek organisasi. 3) Jadwal penilaian Sekolah Dasar Muhammadiyah sudah berjalan baik namun masih terdapat yang belum cocok sasaran paling utama pada kebijakan kepala sekolah yang diterapkan terpaut jadwal penilaian kinerja supervisi sehingga bisa mengenali model di Sekolah Dasar

Muhammadiyah 1 Ponorogo tersebut memakai model kebijakan interplementasi berbasis ke-islaman.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraiandiatas, penelitian pertama mempunyai tujuan menggambarkan Kebijakan pengembangan sumber energi manusia di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat, kedua bertujuan guna mendeskripsikan: 1) Implementasi Kebijakan Sekolah dalam mempraktikkan pembelajaran Kepribadian. 2) Faktor-faktor pendukung serta hambatannya. 3) Upaya-upaya buat menanggulangi faktor-faktor hambatan dalam mempraktikkan pembelajaran kepribadian siswa di MTs Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang. Sedangkan objek yang akan diambil peneliti kali ini terfokus pada peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Jetis Lor, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas yaitu bagaimana peran kepala sekolah dengan kebijakan pembiayaan pendidikan hal ini lebih mengedepankan tentang kebijakan dalam peningkatan pembiayaan yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan dengan melibatkan orang tua siswa Peneliti

---

<sup>14</sup>Moch. Sulton Rachmandhani, "Model Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar Muhamadiyah 1 Ponorogo" (Tesis IAIN Ponorogo, 2014): 7.

juga menganalisis kebijakan yang telah diterapkan serta faktor-faktor yang muncul di objek penelitian.





## BAB II

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN

#### A. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

##### 1. Pengertian Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Kebijakan pembiayaan, istilah yang digunakan dalam beberapa jenis kebijakan yang ada dalam pemerintah ataupun politik. Kata “*Policy*” mengurus permasalahan ataupun kepentingan umum, pula administrasi pemerintah.<sup>1</sup> Disisi lain, Sebutan kebijakan (*Policy*) kerap kali dicampur adukkan dengan kebijakan (*Wisdom*).<sup>2</sup> Kedua istilah ini arti yang berbeda berdasar pada pertimbangan ide dalam proses pembuatannya.

Nanang Fatah melansir komentar Hogwood serta Gun yang membedakan kebijakanseperti label buat bidang aktivitas menyatakan bahwa kebijakan seperti sesuatu ekspresi universal dari tujuan universal ataupun kondisi yang diidamkan. Selain

---

<sup>1</sup> H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*(Jakarta: Rajawali Pers, 2015): 37.

<sup>2</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk memaami Kebjijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009): 16.

itu, Kebijakan seperti proposal spesial keputusan pemerintah, otorisasi resmi, serta program.<sup>3</sup>

Pendapat Eaulau dan Prewitt dikutip oleh H.M. Hasbullah yang menjelaskan Kebijakan sebagai keputusan tetap yang berkarakter konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat serta dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.<sup>4</sup>

Disisi lain, Biaya pendidikan dapat diartikan dengan segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengambilan berupa barang atau layanan jasa dalam rangka pencapaian tujuan di bidang pendidikan. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013):135.

<sup>4</sup> H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015): 38.

<sup>5</sup> Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana & Anak Agung Gede Agung “Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng” *e-Journal Program Pascasarjana*

Biaya pendidikan, satu komponen masukan instrumental input dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hampir tidak ada pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cangkupan yang sangat luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan dari semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dantenaga.

Mulyadi mengemukakan jika dalam makna luas, biaya ialah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan duit, yang sudah terjalin ataupun yang mungkin hendak terjalin

buat tujuan tertentu. Dalam makna kecil, bisa dimaknai bagaikan pengorbanan sumber ekonomi untuk mendapatkan aktiva

Sementara itu, Mulyadi juga mengemukakan bayaran ialah kas ataupun setara kas yang dikorbankan buat mendapatkan benda ataupun jasa yang diharapkan membagikan khasiat, baik saat ini ataupun masa yang hendak tiba. Dari penafsiran diatas bisa ditarik kesimpulan kalau bayaran merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan duit (kas ataupun setara kas), agar mendapatkan benda ataupun jasa yang berguna, baik buat yang hendak terjalin saat ini maupun yang hendak mendatang.

Rancangan biaya dibidang pendidikan memberikan tinjauan terhadap lembaga pendidikan yakni produsen jasa pendidikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, penanaman karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan. Lembaga pendidikan mendapatkan input berupa sumber daya manusia yang lalu diproses pada kegiatan-kegiatan pendidikan dan keterampilan untuk menghasilkan output yang mampu bersaing serta dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.<sup>7</sup>

Ada sebagian gagasan lain mengenai pengertian biaya, seperti Gaspersz mendefinisikan biaya dalam ekonomi

---

<sup>7</sup> Mulyadi, *Akuntansi Biaya edisi 5*, (Yogyakarta: Aditiya Media,2005): 55.

manajerial merupakan paparan serta sesuai sistem produksi, sehingga konsep biaya juga mengacu pada konsep produksi, tetapi apabila pada suatu konsep produksi kita membicarakan penggunaan input secara fisik dalam menghasilkan output produksi, maka dalam konsep biaya kita mengestimasi penggunaan input itu dalam nilai ekonomi yang disebut biaya. Sementara, Sunarto mengartikan biaya sebagai mutu dan bagian yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk mendapat penghasilan selepas itu. Gani menyatakan bahwa biaya merupakan pengorbanan *sacrifice* dimaksud untuk menciptakan atau memperoleh suatu komoditi. Pengorbanan yang tidak mempunyai tujuan jelas termasuk pemborosan dan bukan termasuk biaya. Pandangan lain menurut Simomara bahwa biaya adalah kas atau nilai setara kas yang menjadi sasaran untuk barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat saat ini atau dimasa yang akanm mendatangi bagi suatu organisasi, dalam hal perusahaan. Prathama dan Manurung mendefinisikan khusus bagi akuntan bahwa biaya merupakan total uang yang dikeluarkan untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu.

Dari beberapa pandangan dapat disimpulkan bahwa biaya dimaknai sebagai suatu bentuk pengeluaran satuan mata uang yang dikorbankan untuk mencapai atau mewujudkan

sesuatu. Dengan kata lain, ada 4 (empat) unsur pokok dalam biaya, yaitu: (1) merupakan pengorbanan sumber ekonomi, (2) ditakar pada satuan uang, (3) sudah berlangsung atau secara potensial akan berlangsung dan (4) pengorbanan mendapatkan target tertentu.<sup>8</sup>

Pendidikan melahirkan salah satu aspek penting untuk meluaskan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam UUD 1945 pasal 31 “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran”. Perihal ini membuktikan adanya strategi pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan beragam sudut pandang, termasuk mahalny biaya pendidikan yang wajib dikeluarkan untuk pendidikan. Kondisi semacam ini yang kemudian mendesak dimasukkannya klausul mengenai pendidikan dalam amandemen UUD 1945.

Pengembangan kualitas pendidikan diharapkan dapat mencetuskan manfaat berupa pengembangan kualitas SDM. Disisi lain, prioritas bagian pembiayaan pendidikan sebaiknya diorientasikan untuk menangani permasalahan dalam hal aksesibilitas dan volume. Oleh karena itu, dalam menimbang

---

<sup>8</sup> Fedyw.e, *Pembiyayan Pendidikan, Jurnal pendidikanm dan kebudayaan*, Volume 19 nomor 4, (2013), 566-567.

efektivitas pembiayaan pendidikan terdapat beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang ada dapat terencana penggunaannya sesuai tujuannya.

Agar bisa tercapai dan terlaksana tujuan pendidikan yang optimal, salah satu hal yang sangat signifikan, yaitu mengoperasikan biaya dengan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dana dan kebutuhan yang diperlukan. Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Distribusi anggaran harus dijalankan secara strategis dan integrative antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk memanifestasikan kondisi ini, perlu ditingkatkan rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata kunci untuk melaksanakan efektifitas pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diatas meliputi biaya penyediaan sarana daan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Lebih lanjut, biaya personal

meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (Sulistyoningrum).<sup>9</sup>

## **2. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia**

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>9</sup> Ibid.



Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Disebutkan juga bahwa dana pendidikan kedinasan dialokasikan dari sektor pendidikan ialah minimal 20% dan dari APBD minimal 20%. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan keikutsertaan dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat bersumber dari berbagai pengelola seperti: penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan atau sumber-sumber lainnya yang tidak kontras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 2 yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warna Negara yang berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun. Pasal 12 ayat 1 setiap peserta didik

pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>

Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 setiap warga Negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ridha Vironika, "Pembiayaan Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan dasar*. Jakarta: Universitas Islam Sultan Agung.

<sup>11</sup> Ridha Vironika, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP. pada peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan terdapat keracunan antara bab I pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan, ketentuan umum tentang standar pembiayaan pada pasal (1) tampak lebih sempit dari pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada pasal (1) adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar pembiayaan, pasal 62 disebutkan bahwa:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan

prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: gaji pokok pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.
- 5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP.

Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM

bidang Pendidikan Daerah dan Menengah mengacu kepada PP No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional.

Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah.<sup>12</sup>

Kepmendiknas No.129/U/2004 merupakan hasil revisi dari Kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada Kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga dan pendidikan usia dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

Karena standar pembiayaan juga mencakup kebutuhan atas buku teks pelajaran. Maka perlu diperhatikan Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran yaitu pasal 7: satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri. Pada Pasal 8 ditegaskan bahwa: guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk dimiliki buku teks pelajaran, anjuran sebagaimana dimaksud bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan untuk memiliki buku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya membelinya di pasar untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaan.

Dari landasan hukum tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia yang telah disebutkan diatas dapat kita menarik suatu kritikal isu dalam pembiayaan pendidikan kita. salah satu

kritikal isu dalam pembiayaan pendidikan kita. salah satu kritikal isu adalah apakah biaya pendidikan yang telah diatur dalam UUD 1945 dan telah diperjelas lagi dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang telah dianggarkan dalam APBN dan APBD 20% untuk membiayai pendidikan sudah tepat sasaran.

### 3. Standar Mutu

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 menyebutkan pendidikan Indonesia menggunakan delapan standar dalam membangun meningkatkan kualitas pendidikan. Delapan standar tersebut meliputi:

- a. Standar isi, meliputi lingkungan materi dan tingkat kompetensi untuk mendapat kompetensi lulusan pada suatu jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang berisi kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan.<sup>13</sup>
- b. Standar Proses, dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan diadakan secara baik dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta membagikan

---

<sup>13</sup> Uhar Suharsaputra, “*Administrasi Pendidikan Edisi Revisi*”, Bandung: Rafika Aditama, 2013): 281

ruang yang cukup bagi prakarsa, reaktivitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik.

- c. Standar Kompetensi Lulusan, Dipergunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.<sup>14</sup>
- d. Standar pendidik dan Tenaga kependidikan, harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dengan adanya bukti ijazah dan atau setifikasi keahlian yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai. Kompetensi, sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi professional dan kompetensi sosial.
- e. Standar sarana prasarana, Setiap setaun pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi prabot, peralatan pendidikan,

---

<sup>14</sup>Ibid.



media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, peralatan pendidik, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang pemimpin, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel bekerja, ruang unit bengkel produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- f. Standar pengelolaan, Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Sedangkan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik,

operasional, personalia, keuangan dan area fungsional serta pengelolaan yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

- g. Standar pembiayaan, Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional.
- h. Standar penilaian Pendidikan, Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik: b) pendidikan hasil belajar oleh satuan pendidik. c) Penilaian belajar oleh pemerintah. d) Penilaian belajar meliputi penilaian hasil proses belajar mengajar pendidik, penilaian dari satuan pendidikan tertinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang tinggi telah tersusun dari masing-masing perguruan tinggi yang sudah diatur dan berlaku oleh peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

#### **4. Proses Pembuatan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan**

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi danberpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada,menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus

---

<sup>15</sup>*Ibid*,81.

mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar.

Proses pembuatan kebijakan (*policy making process*), merupakan adopsi proses politik yang dipaparkan sebagai pembuatan kebijakan politik sebagaimana kebijakannya dipaparkan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dengan demikian sebuah kebijakan akan mudah dipahami apabila dikaji tahap demi tahap tersebut, dan menjadikan kebijakan yang bersifat publik akan selalu penuh warna, serta kajiannya amat dinamis.

Penerapan suatu kebijakan pendidikan ialah salah satu tugas lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka pengelolaan tugas pemerintahan Negara dan pendirian bangsa dibidang pendidikan yang tidak dapat diganti, maksudnya didelegasikan, dipindahkan, alias diprivatisasikan kepada organisasi diluar pemerintahan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah merupakan kebijakan yang bersifat bijaksana, dalam arti kebijakan pendidikan tersebut harus mampu memecahkan masalah pendidikan yang

dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak, baik dari segi manfaat, kualitas, maupun akuntabilitasnya.

Disamping itu, kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan permasalahan pendidikan baru yang lebih besar dan lebih kacau dibandingkan problem pendidikan yang hendak diatasi atau diselesaikan. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan juga seharusnya memberikan cita-cita baru bagi warga Negara bahwa mereka dapat menjalani hariesok yang lebih baik setelah kebijakan pendidikan itu diterapkan serta, kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah mendorong kreativitas, kualitas, dan peri kehidupan, bersama dalam bidang pendidikan secara baik dan tepat.<sup>16</sup>

Dunn, membuat rencana kebijakan seperti dipaparkan dibawah ini:

| <b>FASE</b>              | <b>KARAKTERISTIK</b>                                       | <b>ILUSTRASI</b>  |
|--------------------------|--|---|
| <b>PENYUSUNAN AGENDA</b> | Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah | Legislator Negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan |

---

<sup>16</sup>Hasbullah, "*Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesi.*"(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015):64.

| <b>FASE</b>                | <b>KARAKTERISTIK</b>   | <b>ILUSTRASI</b>  |
|----------------------------|--|---|
|                            | <p>pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.</p>  | <p>undang-undang mengirimkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak dipilih.</p>                  |
| <b>FORMULASI KEBIJAKAN</b> | <p>Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.</p> | <p>Peradilan Negara bagian pelarangan pengguna tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dari minoritas.</p> |
| <b>ADOPSI KEBIJAKAN</b>    | <p>Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari</p>   | <p>Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus Roe.V.Wade tercapai keputusan</p>  |

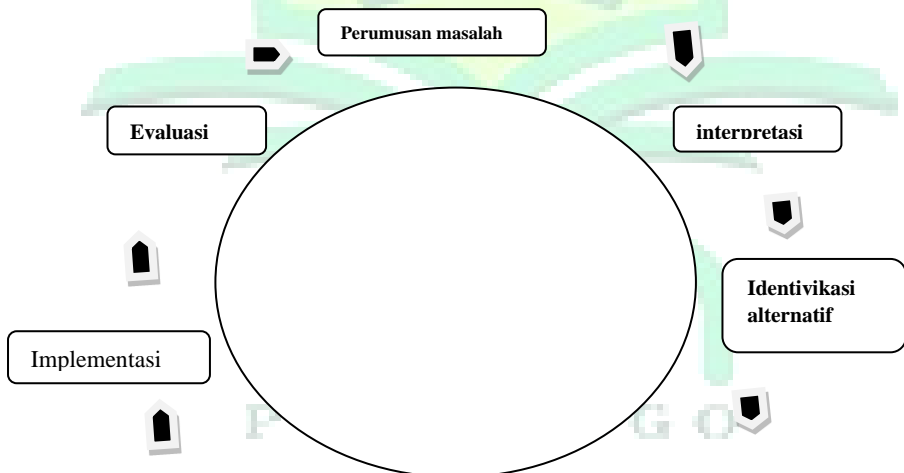
| <b>FASE</b>                   | <b>KARAKTERISTIK</b>   | <b>ILUSTRASI</b>   |
|-------------------------------|--|--|
|                               | mayoritas legislative, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.  | mayoritas bahwa wanita memiliki hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.   |
| <b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN</b> | Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.                  | Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak |
| <b>PENILAIAN KEBIJAKAN</b>    | Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan | Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk                             |

| FASE | KARAKTERISTIK  | ILUSTRASI                                |
|------|--|--|
|      | undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. | menentukan luasnya penyimpangan/korupsi. |

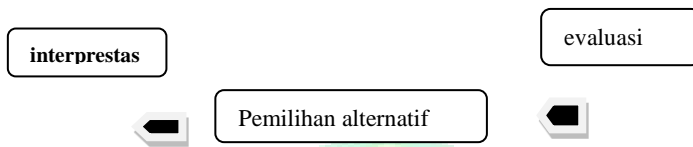
Tabel 1.1

### Rancangan Kebijakan Menurut Dunn

Dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan demi tahapan, dimana antara tahapan satu dengan tahapan yang lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan pendidikan, maka akan banyak dikaji dan diteliti, sebab akibat dan kinerja kebijakan.<sup>17</sup>



<sup>17</sup>Ibid, 65.



Gambar 2.1

Menurut Ino Sutrisno Rawita, dengan mengutip pendapat Panons bahwa proses dasar, siklus hidup ataupun tahapan-tahapan dari suatu kebijakan pendidikan dapat divisualisasikan pada gambar 2. 1, yaitu dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternative solusi, penilaian alternatif, seleksi alternatif, implementasi kebijakan dan kembali kepada perumusan masalah. Disela tahapan-tahapan tersebut terdapat aktivitas penilaian maupun eksplanasi.

Suatu kajian pendidikan dalam proses dasar formulasi kebijakan pendidikan disebut sebagai uraian kebijakan pendidikan, suatu metode yang oleh Dunn, dinamakan sebagai proses politik atau proses intelektual.

Hal yang paling berarti untuk dihindari dalam pengambilan suatu ketetapan ialah kalau kebijakan yang diambil terbukti keliru, sehingga akan berakibat sangat besar, tentu saja kebijakan yang diambil tidak akan berhasil dalam proses



penerapannya, tetapi bisa saja kebijakan yang keliru termuat akan membawa angapan negative dan kontra produktif.

Dalam perumusan kebijakan terdapat beberapa agenda. Adapun runtutan agenda dalam perumusan kebijakan adalah:

#### **a. Agenda Setting**

Perumusan agenda kebijakan (*Agenda Setting*) adalah langkah awal yang sangat pening dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah pokok yang harus dilewati sebelum suatu isu kebijakan dijadikan dalam agenda kebijakan pemerintah (*Government Agenda*) dan hasinya menjadi suatu kebijakan. Tanpa lebih dahulu masuk dalam agenda setting, tidak bisa suatu permasalahan yang ada pada *public* atau seberapa besar masalah yang ada pada *public* tersebut dapat dijadikan suatu kebijakan oleh pemerintah.

Ada kontras agenda kebijakan dalam melihat tahap perhatian yang diberikan pemerintah terhadap problem atau masalah yang diangkat menjadi isu: *awal*, jadwal sistematis ialah seluruh isu yang secara universal ditatap warga politik bagaikan perihal yang pantas mendapatkan atensi publik. Jadwal ini bertabiat abstrak, universal serta kurang menampilkan alternatif metode pemecahan masalahnya. *Kedua*, jadwal pemerintah ialah serangkaian permasalahan yang secara tegas membutuhkan pertimbangan secara aktif serta sungguh-

sungguh dari *policy maker*. Jadwal ini lebih konkret serta memiliki watak khas.

Jadwal sistematis yang masih membutuhkan tahapan panjang lewat kondensasi bisa memastikan apakah masalah tersebut memperoleh persepsi yang sama bagaikan permasalahan publik. Contohnya; wacana tentang desentralisasi pembelajaran dipemerintahan provinsi, bukan pada kabupaten/kota. Walaupun permasalahan ini telah dinaikkan dalam wacana Nasional, tetapi permasalahan ini belum mendapatkan peluang untuk dinaikkan jadi jadwal kebijakan pemerintah.<sup>18</sup>

Walaupun jadwal pemerintah disusun bersumber pada isu-isu yang lebih konkret, hendak namun bukan berarti kalau masing-masing permasalahan yang masuk jadwal pemerintah menampilkan urutan prioritas kebijakan untuk lekas dilaksanakan. Acapkali terjalin permasalahan yang masuk dalam jadwal pemerintah cuma berbentuk masalah-masalah yang palsu ataupun pseudo issues. Permasalahan tersebut dimasukkan serta didiskusikan dalam jadwal pemerintah cuma untuk meredakan gejolak yang terdapat dalam warga, ataupun untuk memuaskan tuntutan kelompok tertentu yang menekan

---

<sup>18</sup>Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, 71.

pemerintah, ataupun dengan memakai sebutan permasalahan hendak di tampung oleh pemerintah apabila mangadapi banyak tekanan, yang pastinya ialah basa- basi politik buat menyejukkan perasaan kelompok- kelompok penekan. Misalnya merupakan tuntutan bayaran pembelajaran disekolah serta akademi besar yang terjangkau oleh segala susunan warga, bukan cuma golongan yang secara ekonomi sanggup.<sup>19</sup>

Ada beberapa pendekatan yang biasa dilakukan dalam pembuatan agenda kebijakan, yaitu:

1) Pendekatan pluralistik

Pendekatan ini berasumsi bahwa semua kekuatan baik lembaga pemerintah maupun yang lain, mempunyai kesempatan yang sama dalam membuat suatu agenda kebijakan melalui mekanisme pasar untuk diusulkan kepada pemerintah

2) Pendekatan elitis

Pendekatan ini berasumsi bawa ada kelompok kecil dalam suatu Negara yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan suatu agenda kebijakan dengan argumentasi

ada keterbatasan kemampuan warna Negara dan golongan diluar elite dalam memahami yang dihadapi Negara.

3) Pendekatan Negara-pusat kekuasaan

Pendekatan ini menekankan bahwa penyusunan agenda kebijakan merupakan wewenang lembaga Negara melalui interaksi eksekutif, legislative dan yudikatif daripada wewenang kelompok, kepentingan maupun masyarakat.

4) *Outside initiative model*

Pendekatan melalui model inisiatif dari luar untuk menggambarkan proses yang akan datang dari masyarakat melalui tahapan artikulasi masalah, memperluas isu menjadi masalah publik dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan.

5) *Inside acces model*

Pendekatan dengan model akses dari dalam digunakan bahwa agenda kebijakan publik hanya dibuat oleh unit atau lembaga resmi pemerintah dan mencegah adanya keterlibatan dari pihak luar.

6) *Mobilization model*

Pendekatan ini dilakukan untuk menjelaskan proses penyusunan agenda kebijakan yang dilakukan pemimpin

politik dan perlunya dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.<sup>20</sup>

### **b. Dari Issue Menjadi Agenda**

Buat bisa jadi jadwal kebijakan, baik sistematis ataupun pemerintah, sesuatu permasalahan arus lewat proses ataupun tahapan tertentu, Ripley menguraikan proses sesuatu isu dinaikan jadi jadwal kebijakan serta berikutnya jadi kebijakan yang diambil pemerintah ialah:

- 1) Ada permasalahan sosial
- 2) Diterima kelompok
- 3) Setelah itu bergabung dengan kelompok yang berbeda
- 4) Jadi isu sosial
- 5) Hingga pada jadwal publik, dalam sesi ini membutuhkan aksi pengartikulasi
- 6) Keputusan kebijakan menimpa sebagian masalah
- 7) Kelompok mulai menekankan strategi isu terpaut.

Mencermati pada tipe perkaranya, Peters membagikan strategi buat memperbesar kesempatan sesuatu permasalahan bisa masuk dalam jadwal kebijakan pemerintah bagaikan berikut:

---

<sup>20</sup>*Ibid* 72.

- 1) Dampak yang ditimbulkan dalam sesuatu permasalahan, menyangkut siapa yang terkena akibat, konsentrasinya, keseriusan serta visibilitas permasalahan.
- 2) Membuat analogy serta mengkaitkannya dengan kebijakan yang sudah terdapat, sebab kerap kali program yang terbuat pemerintah menimbulkan kebutuhan hendak program bonus, sehingga dampak peluberan bisa dimanfaatkan buat bawa kebijakan baru dalam jadwal permasalahan.
- 3) Menghubungkan dengan simbol- simbol serta nilai- nilai yang dianut sesuatu negeri, semacam Indonesia dengan simbol pancasila, adil, makmur, melindungi persatuan serta kesatuan.
- 4) Tidak bisa dicoba dengan pihak swasta
- 5) Ketersediaan teknologi

Kebijakan pembelajaran diformulasikan secara hati- hati, terlebih lagi menyangkut perkara krusial ataupun perkara makro, hingga nyaris bisa ditentukan formulasi kebijakan pembelajaran tersebut dilandasi oleh sesuatu mengerti teori tertentu. Dalam proses perumusannya, para pemegang kewenangan pengambilan kebijakan terlebih dulu sudah mempertimbangkan secara matang, baik secara rasionalitas, proses, nilai, dan dampak samping yang bakal terjadi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid* 75

## 5. Aspek yang Menyebabkan Tahapan Implementasi Kebijakan Tidak Berjalan dengan Baik

### 1) Aspek organisasi”

Suatu kebijakan dalam implementasinya acapkali membutuhkan keterlibatan banyak organisasi( aktor) yang terkadang mempunyai anggapan serta *Interest* yang berlainan. Kondisi ini kerap kali memunculkan masalah (a) koordinasi yang berbeda (b) *compliance*, menyangkut kondisi bawahan pada instansi yang lebih besar.

### 2) Aspek Politik”

Aspek ini acapkali diucap aspek non teknis, yang mencakup: (a) legislasi tentang isu yang sangat kabur bagaikan akibat dari tujuan yang mau dicapai yang kerap tidak jelas (b) log-rolling, dimaksudkan bagaikan gagalnya implementasi sesuatu program kesalahan, pada sesuatu proses legitimasi, proses bargaining yang dicoba aktor-aktor perumus kebijakan dicoba dengan secara tujuan ataupun tidak sepakat terhadap usulan kebijakan dengan ubah tambah ataupun modifikasi usulan, sehingga dampaknya sehabis usulan diresmikan jadi kebijakan, tujuan jadi tidak jelas (*vague*).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan Edisi Revisi*

### 3) Aspek Politik Antar Organisasi( Aktor)

Perbandingan menimpa area politik tiap-tiap organisasi diakibatkan oleh perbandingan interest serta anggapan tiap-tiap aktor. Dalam konteks ikatan antara organisasi (politik) dibagi dalam.

#### a) Struktur Implementasi secara verbal

Hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan seperti yang telah digariskan.

#### b) Struktur Implementasi secara Horizontal

Struktur ini merupakan salah satu fungsi keberhasilan dari implementasi. Disebut *politik antar organisasi dalam implementasi*. Implementasi kebijakan dalam beberapa kasus dapat dilakukan oleh bukan organisasi negara (pemerintah) melainkan oleh independent (berdiri sendiri). Adapun Aspek organisasi yang menjamin implementasi yang berhasil baik adalah (a) adanya kesatuan organisasi (b) standar pelaksanaan prosedur yang jelas (c) mekanisme komunikasi dalam organisasi yang baik (d) tidak ada masalah waktu dalam



implementasi (e) tidak ada masalah informasi dalam implementasi.<sup>23</sup>

## **6. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan**

Perencanaan pembiayaan adalah perencanaan sumber dana dan jumlah yang akan digunakan demi tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan dana juga disebut dengan penganggaran. Penganggaran merupakan suatu kegiatan perencanaan dan koordinasi dari berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan

Dalam suatu periode tertentu dengan melakukan perkiraan kebutuhan yang diperlukan dan hasil yang ingin dicapai serta pengawasan pelaksanaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lipham dalam bukunya E. Mulyasa, empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran berikut: perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran.<sup>24</sup>

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah proses menyusun sumber dana untuk menaungi kegiatan pendidikan dan terciptanya tujuan pendidikan. Perencanaan

---

<sup>23</sup> Muh, Sulton Rachmadani, *Kebijakan Kepala Sekolah dalam pengembangan Mutu*, (Tesis IAIN Ponoroo: 2018)

<sup>24</sup> Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007): 135.

mengayomiberbagai sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan pendanaan atau *budget*, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Rencanaan keuangan sekolah setidaknya mencakup 2 kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (sekolah) atau RAPBM<sup>25</sup>.Dijabarkan uraiannya sebagai berikut:

1) Penyusunan anggaran

Dalam hal ini biasanya dijabarkan dalam format-format yang mencangkupberbagai sumber antara lain DPP, OPF, BP3 andaikan disekolah tersebut ada pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran, serta honorarium dan kesejahteraan. Penganggaran memiliki beberapa karakteristik dan fungsi

a) Karakteristik Anggaran

Anggaran memiliki dua sisi baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau sisi pemerolehan biaya ditentukan oleh besarnya biaya yang diterima oleh lembaga dari sumber dana misalnya dari pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik dan sumber-sumber lainnya

---

<sup>25</sup> Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011): 113-114.

Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya, biaya pembelian atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai<sup>26</sup>

#### b) Fungsi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan memiliki fungsi yang sangat besar karena merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada satu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009): 131

<sup>27</sup> Dadang Suhardan, *Ekonomi Dan Pembiayaan*, (Bandung: Alfabeta, 2012): 84

Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Oleh karena itu anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, anggaran dapat pula dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan dan manajer dan karyawan untuk bekerja efisien dalam mencapai sasaran-sasaran Lembaga.<sup>28</sup>

## 2) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (PRABM)

Proses pengembangan RABM pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:<sup>29</sup>

### a) Pada tingkat kelompok kerja

Kelompok kerja yang dibentuk madrasah, yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, berikutnya diklasifikasikan, serta dicoba perhitungan cocok dengan kebutuhan. Dari hasil analisis

---

<sup>28</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam.....* hlm 49

<sup>29</sup>Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*

kebutuhan bayaran yang dicoba oleh kelompok kerja berikutnya dicoba pilih alokasi yang diperkirakan sangat menekan serta tidak dapat dikurangi, sebaliknya yang ditatap tidak memakai kelanjutan aktivitas pembelajaran, spesialnya proses belajar mengajar hingga bisa dicoba pengurangan bayaran cocok dengan yang tersedia

b) Pada tingkatan kerjasama dengan komite madrasah

Perihal ini butuh dicoba buat mengadakan rapat pengurus serta anggota dalam rangka meningkatkan aktivitas yang wajib dicoba sehubungan dengan RAPBM

c) Sosialisasi serta legalitas

Pada sesi ini, kelompok kerja melaksanakan konsultasi serta laporan pada pihak pengawas, dan mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Kementerian Agama buat menemukan pertimbangan.

## **7. Implementasi (Pelaksanaan) Pembiayaan Pendidikan**

Implementasi (Pelaksanaan) ialah suatu aktivitas atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara mendalam dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pemahaman mudahnya pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut

Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai “evaluasi”. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.<sup>30</sup>

Kegiatan kedua dalam manajemen pendidikan adalah akuntansi, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk mengembangkan hasil kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan konversi (perubahan) sumber daya yang ada menjadi barang dan jasa yang bisa dipakai. Oleh karena itu *accounting* berkaitan dengan mengukur dan menyingkap hasil dari kegiatan konversi sumber daya tadi. Seperti yang dikatakan dalam bukunya E. Mulyasa. Dalam pelaksanaan keuangan madrasah ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan keuangan madrasah dari sumber-sumber dan perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pengeluaran, dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan

---

<sup>30</sup> Usman Nurdin, “*Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2002) 70

dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah. Pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan berikut:

- a. Penerimaan, pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang telah disepakati, sedangkan sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan dana masyarakat, donatur, dan lain-lain
- b. Pengeluaran, yakni dana yang sudah didapat dari bermacam sumber yang perlu digunakan secara efektif dan efisien<sup>31</sup>  
Secara teknis, pelaksanaan pengeluaran anggaran di sekolah disesuaikan dengan sumber dana yang diterima.

Adapun pelaksanaan pembiayaan menurut Mohamad Mustari terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

- 1) Asas umum penata laksanaan

Dalam asas ini aktivitas penatalaksanaan ialah terdapatnya administrasi pembiayaan serta pembukuan ataupun pengurusan keuangan, yang meliputi dua hal:

---

<sup>31</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah "Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri"*, (Jakarta, Ar Ruz Media, 2012): 239-240.

- a) Pengurusan yang menyangkut kewenangan memastikan kebijakan menerima ataupun menghasilkan duit (pengurus ketatausahaan).
- b) Urusan tindak lanjut urusan awal, ialah menerima, menaruh, serta menghasilkan duit (pengurusan bendahara). Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan memastikan, tetapi cuma melaksanakan. Pada praktiknya, kepala sekolah serta bendahara sekolah yang menerima ataupun memahami duit/ benda/ kekayaan sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkala kepala sekolah harus melaksanakan pengecekan terhadap penatausahaan keuangan sekolah pada minimum tiap 3 bulan sekali. Dokumen yang berkaitan dengan pesan fakta yang jadi dasar penerimaan serta pengeluaran atas penerapan APBS ditandatangani oleh bendahara sekolah serta disahkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang menandatangani serta mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan pesan fakta yang jadi dasar penerimaan serta pengeluaran atas penerapan APBS bertanggung jawab terhadap kebenaran material serta hendak mencuat dari pemakaian pesan fakta yang diartikan. Ada pula penatalaksanaan pembiayaan dana BOS wajib cocok dengan petunjuk teknis BOS.



## 2) Penata usahaan penerimaan

Penerimaan terhadap bayaran pembelajaran ditetapkan oleh besarnya bayaran yang diterima oleh sekolah ataupun madrasah darisetiap sumber pendanaan. Sumber pembiayaan pembelajaran secara universal berasal dari pemerintah, warga, orang tua siswa serta sumber- sumber lain. Sebagian besar penerimaan ataupun pemasukan bayaran pembelajaran sepanjang ini berasal dari orang tua siswa.<sup>32</sup>

Pembukaan terhadap penerimaan ataupun pemasukan bayaran pembelajaran pada umumnya didasarkan pada prosedur pembukuan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati, baik berbentuk konsep teoritis ataupun peraturan pemerintah. Penanggung jawab terhadap seluruh penerimaan/ pemasukan bayaran pembelajaran serta pula pembukuannya dipegang seluruhnya oleh bendahara lembaga pembelajaran yang bersangkutan dengan dikenal oleh kepala sekolah.

## 3) Penata usahaan pengeluaran

Aktivitas pengeluaran bayaran pembelajaran pastinya tidak menyimpangan dari Rencana Anggaran Pemasukan serta Belanja Sekolah (RAPBS). Pengeluaran bayaran

---

<sup>32</sup> Mohamad Mustari, "*Manajemen Pendidikan*", (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014): 193-194.

pembelajaran dipergunakan secara efektif serta efisien, maksudnya tiap penerimaan/pemasukan dana, buat pengeluarannya wajib didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang direncanakan. Pengeluaran bayaran pembelajaran umumnya berbentuk bayaran langsung serta tidak langsung. Bayaran langsung yakni bayaran yang langsung digunakan buat operasional sekolah serta langsung dikeluarkan buat kepentingan penerapan proses belajar mengajar, terdiri atas dana pembangunan serta dana teratur. Sebaliknya bayaran tidak langsung merupakan bayaran yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua serta masyarakat buat mendukung keperluan yang tidak langsung.

Dalam pelaksanaan pengeluaran keuangan sekolah ada hal-hal berikut yang wajib diperbuat

- a) Bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran tau penggunaan dana menjadi tanggung jawabnya.
- b) Semua pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum
- c) Selain dicatat pada buku kas umum, semua pengeluaran dicatat dalam buku bantu pengeluaran sesuai dengan jenis kegiatan

- d) Bendahara sekolah wajib mempertanggung jawabkan atas penerimaan dan pengeluaran dana yang menjadi tanggung jawan kepada kepala sekolah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- e) Dalam mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran dana, bendahara sekolah menggunakan buku kas umum dan laporan.<sup>33</sup>

## **8. Tujuan Biaya (pembiayaan) Operasional**

Tujuan dari biaya BOS ialah untuk membantu suatu sekolah dalam proses memajukan kualitas pendidikannya. Salah satu sumbernya yaitu biaya dari pemerintah atau yang lebih akrab dengan BOS.

Secara luas program BOS bertujuan untuk mengurangi atau membantu masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan atau sekolah yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Melepaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa kurang mampu di tingkat pendidikan dasar atau

---

<sup>33</sup> Mulyono, “*Konsep pembiayaan pendidikan*”, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010): 189-191.

sekolah dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.<sup>34</sup>

- b. Melepaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri
- c. Mengurangi beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga. Menurut Mulyono diantaranya: “program dalam rangka pemerataan dana perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik”<sup>35</sup>, sehingga pada akhirnya mutu pendidikan dapat tercapai dengan optimal.

## 9. Evaluasi mengajar

---

<sup>34</sup> Salinan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang *petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018*, 2-3.

<sup>35</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan....* hlm 198

### **a. Pengertian Evaluasi**

Evaluasi berarti penentuan hingga seberapa jauh suatu berharga, bermutu ataupun bernilai. Penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa serta terhadap proses belajar mengajar memiliki evaluasi terhadap hasil belajar ataupun proses belajar itu, hingga seberapa jauh keduanya bisa dinilai baik. Sesungguhnya yang dinilai cumalah proses belajar mengajar namun evaluasi ataupun penilaian itu diadakan lewat peninjauan terhadap hasil yang diperoleh siswa sehabis menajaki proses belajar serta lewat peninjauan terhadap fitur komponen yang bersama membentuk proses belajar mengajar.<sup>36</sup>

Bagi Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pembelajaran Nasional Pasal 57 ayat(1), penilaian dicoba dalam rangka pengendalian kualitas pembelajaran secara nasional bagaikan wujud akuntabilitas penyelenggara pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain terhadap partisipan didik, lembaga serta program pembelajaran. Dalam makna luas, penilaian merupakan sesuatu proses merancang, mendapatkan serta sediakan data yang sangat dibutuhkan buat membuat alternatif-alternatif keputusan. Cocok dengan penafsiran tersebut hingga

---

<sup>36</sup> H.M. Sulton, Moh. Khusnuridlo, *“Manajemen Pondok Pesantren dalam Prespektif Global”*, (Yogyakarta: PESSindo,2006)

tiap aktivitas penilaian ataupun evaluasi ialah sesuatu proses yang terencana direncanakan buat mendapatkan data ataupun informasi, bersumber pada informasi tersebut setelah itu dicoba membuat sesuatu keputusan.<sup>37</sup>

### **b. Tujuan evaluasi Kebijakan**

Dicoba dengan iktikad:

- 1) Mengenal apakah hal- hal yang sudah diformulasikan dalam formasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.
- 2) Mengenal apakah rumusan- rumusan kebijakan yang tertulis sudah sukses dilaksanakan atau tidak
- 3) Mengenal kelebihan serta kekurangan rumusan kebijakan dalam kaitannya dengan aspek kondisional serta situasional dimana kebijakan tersebut dilaksanakan
- 4) Mengenal seberapa jauh sesuatu rumusan kebijakan yang sudah bisa di implementasikan
- 5) Mengenal keberhasilan serta kekurangan penerapan kebijakan
- 6) Mengenal seberapa akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu kebijakan terhadap khalayak yang diartikan dituju oleh kebijakan serta khalayak yang tidak bermaksud dituju oleh kebijakan

---

<sup>37</sup>M.Ngalim Purwanto, “Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran”,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994): 3.

- 7) Mengetahui apakah resiko- resiko yang tela diperitungkan pada dikala perumusan sudah bisa diatasi dengan baik ataukah tidak
- 8) Mengenali langkah- langkah yang bisa ditempuh dalam perihal revisi kebijakan<sup>38</sup>

## **B. Mutu Pembelajaran**

### **1. Pengertian Mutu Pembelajaran Menurut Para Ahli**

Dalam pandangan Zamroni mengatakan bahwa peningkatan mutu sekola ialah “Suatu perencanaan yang bersistem secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar dengan tujuan target sekolah bisa tercapai dan lebih efektif dan efisien”.<sup>39</sup> Menurut Hamzah dalam buku “Perencanaan Pembelajaran”

Mengatakan lebih pada peningkatan disiplin ilmu yang menitik berat kan pada mutui dan kualitas”.<sup>40</sup> Sudarwan Danim, dalam buku Sri Minarti yang berjudul Manajemen sekolah bahwa mutu

---

<sup>38</sup>Oemar Hamalik, “*Evaluasi Kurikulum*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990):22.

<sup>39</sup> Zamroni, “*Meningkatkan Mutu Sekolah*”, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007): 2.

<sup>40</sup>*Ibid.*, 2.

pendidikan menitik beratkan, proses, iuran, dan aplikasinya (dampaknya).<sup>41</sup>

Dalam konteks pembelajaran penafsiran kualitas, dalam perihal ini mengacu pada proses pembelajaran serta hasil pembelajaran. Dalam “ proses pembelajaran” yang bermutu ikut serta bermacam input, semacam: bahan ajar (kognitif, afektif serta psikomotorik), metodologi (bermacam-macam cocok dengan keahlian guru), fasilitas, sekolah, sokongan administrasi serta fasilitas prasarana serta sumber energi yang lain dan penciptaan atmosfer yang kondusif.

Sebaliknya penafsiran pendidikan bagi para tokoh merupakan: Bagi Tahirin dalam novel yang bertajuk Psikologi Pendidikan mengemukakan komentar Hamalik kalau: Belajar memiliki penafsiran terbentuknya pergantian dari anggapan serta sikap, tercantum pula revisi sikap. Belajar pula bisa dimaksud bagaikan sesuatu proses mengarah pergantian. Hendak namun pergantian dikatakan belajar apabila: (a) pergantian terjalin secara siuman, (b) pergantian belajar bertabiat kontinue serta fungsional, (c) pergantian dalam belajar bertabiat positif serta aktif, (d) bperubahan dalam belajar bertujuan serta terencana, (e) pergantian mencangkup segala

---

<sup>41</sup> Sri Minarti, “*Manajemen Sekolah*”, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011): 328-329.



aspek tingkah laku.<sup>42</sup>

Dari sebagian penafsiran diatas, bisa ditarik kesimpulan kalau peningkatan kualitas pendidikan ialah suatu rangkaian proses aktivitas pendidikan yang wajib dikerjakan oleh pendidik serta partisipan didik buat membetulkan mutu ataupun kualitas dari pendidikan tersebut secara terus menerus dengan tujuan pendidikan bisa berjalan secara efisien serta efektif, guna berikan nilai tambah pada hasil lulusan dari sesuatu lembaga pembelajaran.

Dari proses pendidikan tersebut terdiri atas seluruh komponen modul pendidikan serta prosedur aktivitas belajar mengajar yang dicoba oleh guru yang hendak di informasikan kepada partisipan didik buat menggapai tujuan pendidikan yang mau dicapai.

Adapula khasiat kualitas untuk dunia pembelajaran sebab, (a) tingkatkan pertanggung jawaban (akuntabilitas) sekolah kepada warga serta ataupun pemerintah yang sudah membagikan sumua bayaran kepada sekolah, (b) menjamin kualitas lulusan, (c) bekerja lebih professional, (d) tingkatkan persaingan yang sehat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Fathul Mujib, “*Diktat Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*”, (STAIN Tulungagung, 2008): 67.

<sup>43</sup> Syaiful Bahri Djamarah, “*Psikologi Belajar*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002): 15.

Pendidikan ialah sesuatu sistem instruksional yang mengacu pada fitur komponen yang silih tergantung satu sama lain buat menggapai tujuan. Selaku sesuatu sistem. Pendidikan meliputi sesuatu komponen, antara lain tujuan, bahan, partisipan didik, guru, tata cara, suasana serta penilaian.<sup>44</sup>

Supaya tujuan itu tercapai, seluruh komponen yang terdapat wajib diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjalin kerjasama. Oleh sebab itu, guru tidak boleh cuma mencermati komponen- komponen tertentu saja misalnya tata cara, bahan serta penilaian saja, namun dia arus memikirkan komponen secara totalitas.

Terpaut menimpa kualitas pendidikan yang maksudnya mempersoalkan gimana aktivitas pendidikan yang hendak dicoba sepanjang ini berjalan dengan baik dan bisa menciptakan lulusan yang baik cocok dengan apa yang diharapkan. Dalam tingkatkan mutu pendidikan, hingga kita wajib mencermati menimpa sebagian komponen yang bisa pengaruhi pendidikan. Komponen-komponen tersebut merupakan:

- a) Siswa serta guru
- b) Kurikulum
- c) Fasilitas serta prasarana pendidikan

---

<sup>44</sup> Husaini Usman, *“Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008): 481.

- d) Pengelolaan sekolah, meliputi pengelolaan kelas, guru, siswa, fasilitas serta prasarana, kenaikan tata tertib serta kepemimpinan.
- e) Pengelola proses pendidikan, meliputi penampilan guru, kemampuan modul, dan pemakaian strategi pendidikan.
- f) Pengelolaan danagram)
- g) Evaluasi
- h) Kemitraan, meliputi ubungan sekolah dengan lembaga lain.<sup>45</sup>

Banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh lulusan pembelajaran yang tidak bermutu, program kualitas ataupun upaya-upaya buat tingkatan kualitas pembelajaran ialah perihal yang teramat berarti. Buat melakukan program kualitas dibutuhkan sebagian dasar yang kokoh, ialah bagaikan berikut:

- a) Komitmen

Pemimpin ataupun kelompok yang mau mempraktikkan program kualitas wajib mempunyai komitmen ataupun tekad buat berganti. Pada intinya, kenaikan kualitas merupakan melaksanakan pergantian kearah yang lebih baik serta lebih berbobot. Lazimnya, pergantian tersebut memunculkan rasa khawatir, sebaliknya komitmen bisa melenyapkan rasa

---

<sup>45</sup> Martinis Yamin dan Maisah, “*Manajemen Pembelajaran Kelas Strategi Meningkatkan Mutu Pembelajaran*”, (Jakarta: Gaung Persada, 2009): 164-166.

khawatir.

b) Uraian yang jelas tentang keadaan yang ada

Banyak kegagalan dalam melakukan pergantian sebab melaksanakan suatu saat sebelum suatu yang jelas.

c) Memiliki visi yang jelas terhadap masa depan

Hendaknya, perubahan yang akan dilakukan berdasarkan visi tentang perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Pada awalnya, visi tersebut hanya dimiliki oleh pimpinan atau seseorang inovator, kemudian dikenalkan pada orang-orang yang akan membimbing tim dalam perjalanan pelaksanaan program mutu.

d) Mempunyai perencanaan yang jelas

Mengacu pada visi, sebuah tim menyusun rencana yang jelas. Rencana menjadi pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu. Pelaksana program mutu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal ataupun eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut akan selalu berubah. Rencana harus selalu di-*up-date* sesuai dengan perubahan-perubahan. Tidak ada program mutu yang berhenti (stagnan) dan tidak ada dua program yang identik karena program mutu selalu berdasarkan dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Program

mutu merefleksikan lingkungan pendidikan dimanapun ia berada.<sup>46</sup>

## 2. Makna Mutu Pembelajaran

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa arab “artinya baik”.<sup>47</sup> dalam bahasa Inggris “*quality* artinya mutu, kualitas”.<sup>48</sup> Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “Mutu adalah (ukuran ), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb)”.<sup>49</sup> Secara istilah mutu adalah “Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan.

Dari berbagai pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah kualitas atau sebagai alat ukur baik atau buruk suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-nya, melalui

---

<sup>46</sup>*Ibid*,

<sup>47</sup> Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*”, (Bandung : Al-Ma’arif, 1984): 110

<sup>48</sup> John M. Echolis, Hasan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, (Jakarta : Gramedia, 1988) Cet. Ke XVI: 460

<sup>49</sup>M.N Nasution, “*Manajemen Mutu Terpadu*”, (Jakarta: Galia Indonesia, 2004): 55.

berbagai upaya bimbingan, pengajaran dan pelatihan. Mutu dibidang pendidikan meliputi mutu input, proses output dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Suatu Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan (PAKEM).

### **3. Indikator Mutu Pendidikan**

Indikator sebuah mutu pendidikan ialah dilihat dari hasil akhir, misalnya tes tertulis (hasil UTS, UAS), anakdot, skala sikap (baik atau buruk). Dalam konteks pendidikan, indikatornya ber kiblata hasil pendidikan yaitu prestasi yang di capai atau diperoleh oleh suatu lembaga atau sekolah, pada waktu tertentu. Sedangkan prestasi bisa di lihat dari prestasi akademik maupun non akademik.<sup>50</sup>

### **4. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu.**

Dalam kenaikan kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh input serta aspek proses manajemen pembelajaran. Input pembelajaran merupakan seluruh suatu yang wajib ada sebab diperlukan buat berlangsungnya proses. Input pembelajaran

---

<sup>50</sup>Undang-undang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2011

merupakan seluruh suatu yang wajib ada karena dibutuhkan buat berlangsungnya proses. Input pembelajaran terdiri dari segala sumber energi sekolah bagi Subagio terdiri dari man, money, policy.<sup>51</sup> Dari penafsiran diatas hingga input pembelajaran ialah aspek yang pengaruhi kualitas bisa berupa:

a. Sumber energi manusia bagaikan pengelola sekolah terdiri dari

- 1) Kepala Sekolah ialah guru yang menemukan tugas bagaikan kepala
- 2) Guru ialah merupakan pendidik professional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, memusatkan serta melatih, memperhitungkan serta mengevaluasi partisipan didik
- 3) Tenaga kependidikan.

b. Fasilitas Prasarana

Fasilitas prasarana pembelajaran ialah media belajar ataupun perlengkapan bantu yang pada hakikatnya hendak lebih mengefektifkan komunikasi serta interaksi antara guru serta siswa dalam proses pendidikan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Subagio Atmodiwirio, "*Manajemen Pendidikan Indonesia*", (Jakarta:ArdadizyaJaya, 2002):22.

<sup>52</sup>Oemar Hamalik, "*Evaluasi Kurikulum*", (Bandung:Remaja Rosdakarya,1990): 22.

#### c. Kesiswaan

Siswa bagaikan partisipan didik ialah salah satu input yang ikut memastikan keberhasilan proses pembelajaran. Penerimaan siswa bersumber pada pada kriteria yang jelas transparan serta akuntabel.

#### d. Pembiayaan

Salah satu aspek yang membagikan pengaruh terhadap kenaikan kualitas serta kesesuaian pembelajaran merupakan pembiayaan pembelajaran yang mencukupi. Sekolah wajib mempunyai dana yang lumayan buat menyelenggarakan pembelajaran. Oleh sebab itu pembiayaan wajib dikelola secara transparan.

### **5. Pendekatan Pembelajaran**

Pendekatan pendidikan bisa dimaksud bagaikan titik tolak ataupun sudut pandang kita terhadap proses pendidikan.

Secara lughawi, pendekatan berarti proses, metode, perbuatan mendekati. Secara sebutan pendekatan bertabat aksiomatis yang melaporkan pendirian, filsafat, keyakinan, paradigma, terhadap subjek matter yang wajib dianjurkan dalam proses pembelajaran serta berikutnya melahirkan tata cara



pembelajaran.<sup>53</sup> Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan kalau pendekatan merupakan sesuatu metode yang digunakan didalam proses pembelajaran serta masih bertabiat universal, setelah itu hendak melahirkan suatu tata cara. Sebagian pendekatan dalam pendidikan yang pada intinya ada 6 pendekatan, ialah:

a) Pendekatan pengalaman

Pendekatan ini membagikan pengalaman keagamaan kepada partisipan didik dalam rangka penanaman nilai- nilai keagamaan.

b) Pendekatan pembiasaan

Bisa membagikan peluang kepada partisipan didik buat tetap mengamalkan ajaran agamanya serta ataupun akhlakul karimah.

c) Pendekatan emosional

Ialah usaha buat menggugah perasaan serta emosi partisipan didik dalam meyakini, menguasai serta menghayati akidah Islam dan berikan motivasi supaya partisipan didik ikhlas mengamalkan ajaran agamanya, spesialnya yng berkaitan akhlakul karimah.

d) Pendekatan rasional

---

<sup>53</sup> Wina Sanjaya, “*Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group): 127.

Usaha buat membagikan peranan rasio( ide) dalam menguasai serta menerima kebenaran ajaran agama.

e) Pendekatan fungsional

Usaha menyajikan agama Islam dengan menekankan pada segi kemanfaatannya untuk partisipan didik dalam kehidupan cocok dengan tingkatan perkembangannya.

f) Pendekatan keteladan

Menyuguhkan keteladanan, baik yang menghasilkan keadaan pergaulan yang akrab anantara personal sekolah, sikap pendidik serta tenaga pembelajaran yang mencerminkan akhlak terpuji, ataupun yang tidak langsung lewat suguhan ilustrasi berbentuk kisah- kisah keteladanan.<sup>54</sup>

## **6. Mutu (kualitas) Pembelajaran**

Banyak pakar yang mengemukakan tentang mutu, mutu merupakan suatu filosofis serta metodologis yang menolong institusi buat merancang pergantian serta mengendalikan jadwal dalam mengalami tekanan- tekanan eksternal yang kelewatan. Bagi Sudarwan Danim mutu memiliki arti derajat keunggulan sesuatu produk ataupun hasil kerja, baik berbentuk benda serta

---

<sup>54</sup> Novan Ardy Wiyani, Barnawi, “*Ilmu Pendidikan Islam*”, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Meda, 2012): 185.

jasa.<sup>55</sup> Sebaliknya Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, kualitas merupakan dimensi, baik kurang baik sesuatu barang, taraf ataupun derajat (keahlian, kecerdasan, serta sebagainya) mutu.<sup>56</sup>

Manajemen mutu terpadu (Total Quality Manajemen) dalam konteks pembelajaran ialah suatu filosofi metodologi tentang revisi secara terus menerus, yang bisa membagikan seperangkat perlengkapan instan kepada tiap institusi pembelajaran dalam penuhi kebutuhan, kemauan serta harapan pelanggan, dikala ini ataupun masa yang hendak tiba.<sup>57</sup>

Definisi mutu mempunyai konotasi yang beragam bergantung orang yang memanfaatkannya. Mutu berasal dari dari bahasa latin ialah “*Qualis*” yang berarti *what kind of* (bergantung kata apa yang mengikutinya). Kualitas bagi Deming yakni kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu atau Kualitas bagi Juran yakni kecocokan dengan kebutuhan.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Sudarwan Danim, “*Visi Baru Manajemen Sekolah*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007): 53.

<sup>56</sup> Tim Penyusun, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005): 677.

<sup>57</sup> Edward Sallis, “*Total Quality Manjemen In Education*, terj., Ahmad Ali Riyadi (Yogyakarta: Ircisod, 2006): 73.

<sup>58</sup> Usman Husaini, “*Manajemen Teori, Praktek, Dan Riset Pendidikan*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006): 407.

Dari komentar diatas bisa disimpulkan kalau kesesuaian antara perencanaan yang terbuat guru dengan pelaksanaan maupun silabus yang terbuat guru dengan kebutuhan siswa, hingga proses pembelajaarn tersebut dikira bermutu. Begitu kecocokan dengan kebutuhan, ini bisa disimpulkan kalau kecocokan waktu mengajar yang diseleksi, strategi yang digunakan serta tata cara yang digunakan guru sesuai dengan tingkatan siswa yang menerimanya.

Dalam pembelajaran, mutu merupakan sesuatu keberhasilan proses belajar yang mengasyikkan serta membagikan kenikmatan. Pelanggan dapat berbentuk mereka yang langsung jadi penerima produk serta jasa tersebut ataupun mereka yang nantinya hendak merasakan khasiat produk serta jasa tersebut. Hingga dalam konteks pembelajaran penafsiran mutu, dalam perihal ini mengacu pada proses pembelajaran serta hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang bermutu ikut serta bermacam input, semacam; bahan ajar (kognitif, afektif serta psikomotorik), metodologi (bermacam-macam cocok keahlian guru), fasilitas sekolah, sokongan administrasi serta fasilitas prasarana serta sumber energi yang lain dan penciptaan atmosfer yang kondusif. Manajemen sekolah, sokongan kelas berperan mensinkronkan bermacam input tersebut ataupun mensinergikan seluruh komponen dalam

interaksi (proses) belajar mengajar yang baik antara guru, siswa serta fasilitas pendukung di kelas ataupun di luar kelas; baik konteks kurikuler ataupun ekstra- kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis ataupun yang non- akademis dalam atmosfer yang menunjang proses pendidikan. Kualitas dalam konteks hasil pembelajaran mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada tiap kurun waktu tertentu (apakah masing-masing akhir semester, akhir tahun, 2 tahun ataupun 5 tahun, apalagi 10 tahun). Prestasi yang dicapai ataupun hasil pembelajaran (*student achievement*) bisa berbentuk hasil test keahlian akademis, misalnya; ulangan setiap hari, ulangan universal, tes semester ataupun tes akhir semester. Buat mengukur kualitas tersebut, hingga penanda ataupun kinerja yang bisa dijadikan tolak ukur mutu(kualitas), ialah:

- a. Hasil akhir pendidikan
- b. Hasil langsung pembelajaran, hasil langsung inilah yang dipakai bagaikan tolak ukur kualitas dalam sesuatu lembaga
- c. Proses pendidikan
- d. Instrument input, ialah perlengkapan berhubungan dengan raw-input (siswa) serta Area.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Nurhasan, “*Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia Kurikulum untuk Abad 21: Indikator Cara Pengukuran dan Faktopr-faktor yang Mempengaruhinya Mutu Pendidikan*”,(Jakarta: Sindo, 2004): 390.

Usman dari Sallis mengemukakan mutu(kualitas) merupakan konsep yang mutlak serta relatif. Kualitas yang mutlak yakni kualitas yang idealismenya besar serta wajib dipadati, berstandar besar, dengan watak produk bergengsi besar. Kualitas yang relatif tidaklah suatu akhir, tetapi bagaikan suatu perlengkapan yang sudah diresmikan ataupun jasa dinilai, ialah apakah sudah penuh standar yang sudah diresmikan. Kualitas dibidang pembelajaran meliputi; kualitas input, proses, output serta outcome. Input pembelajaran dinyatakan bermutu bila siap berproses. Proses pembelajaran bermutu apabila sanggup menghasilkan atmosfer yang PAKEM (Pendidikan Aktif, Kreatif serta Mengasyikkan). Output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik siswa besar. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan kilat terserap di dunia kerja, pendapatan normal, seluruh pihak mengakui kehebatannya lulusan serta merasa puas.<sup>60</sup> Sebaliknya bagi Hari Sudrajat, pembelajaran yang bermutu merupakan pembelajaran yang sanggup menciptakan lulusan yang mempunyai keahlian ataupun kompetensi, baik kompetensi akademik ataupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal serta sosial, dan nilai- nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya ialah kecakapan hidup (*lifeskill*), lebih lanjut Sudrajat mengemukakan

---

<sup>60</sup> Usman Husaini, *Manajemen*: 408-410.

pembelajaran bermutu merupakan pembelajaran yang sanggup menciptakan manusia seutuhnya( manusia paripurna) ataupun manusia dengan individu yang integral(*integrated personality*) ialah mereka yang sanggup mengintegalkan iman, ilmu serta amal.

Sumayang melaporkan mutu quality (kualitas) merupakan tingkatan dimana rancangan spesifikasi suatu produk benda serta jasa cocok dengan guna serta penggunaannya, disamping itu quality (kualitas) merupakan tingkatan dimana suatu produk benda serta jasa cocok dengan rancangan spesifikasinya. Untuk tiap institusi kualitas merupakan jadwal utama serta kualitas ialah tugas yang sangat berarti. Meski demikian, terdapat sebagian orang yang menganggap kualitas suatu konsep yang penuh dengan misteri, kualitas ialah perihal yang membingungkan serta susah diukur. Ini berarti terdapat perbandingan dalam mendefinisikan kualitas. Dapat saja kita menggapai hasil serta mengenali kualitas kala kita mengalaminya serta senantiasa hendak terasa susah kala hendak mendeskripsikan serta menarangkan Mengenai kualitas. Kualitas ialah sesuatu perihal yang membedakan antara yang baik serta/ataupun kebalikannya. Dengan demikian kualitas ialah permasalahan pokok yang hendak menjamin pertumbuhan

sekolah dalam mencapai status di tengah- tengah persaingan dunia pembelajaran yang makin keras.

Pelaku-pelaku dunia pembelajaran menyadari keharusan mereka buat mencapai kualitas tersebut serta menyampaikannya pada pelajar serta anak didik. Sebab itu terdapat banyak aspek yang bisa jadi penanda kualitas, misalnya; gedung yang bagus, guru yang termuka, nilai moral yang besar, hasil tes yang memuaskan, spesialisasi ataupun kejuruan, dorongan orang tua, bisnis serta komunitas lokal, sumber energi yang melimpah, aplikasi teknologi canggih, kepemimpinan yang baik serta efisien, atensi terhadap pelajar, serta anak didik, kurikulum yang mencukupi, ataupun pula campuran dari faktor- faktor tersebut. Unsur- unsur yang ikut serta dalam tingkatkan kualitas pendidikan bisa dilihat dari sudut pandang makro serta mikro.

#### a. Pendekatan Mikro Pendidikan

Ialah sesuatu pendekatan terhadap pembelajaran dengan penanda kajiannya dilihat dari ikatan antara elemen partisipan didik, pendidik, serta interaksi keduanya dalam usaha pembelajaran. Secara lengkap elemen mikro bagaikan berikut:

- 1) Mutu manajemen
- 2) Pemberdayaan satuan pendidikan
- 3) Profesionalisme serta ketenagaan
- 4) Relevansi serta kebutuhan.



Bersumber pada tinjauan mikro, elemen guru serta siswa yang ialah bagian dari pemberdayaan satuan pembelajaran ialah elemen sentral. Pembelajaran buat kepentingan partisipan didik memiliki tujuan, serta buat menggapai ini terdapat bermacam sumber serta hambatan, dengan mencermati sumber serta hambatan diresmikan bahan pengajaran serta di upayakan berlangsungnya proses buat menggapai tujuan. Proses ini menunjukkan hasil belajar, hasil belajar butuh dinilai serta dari hasil evaluasi bisa ialah umpan balik bagaikan bahan masukan serta pijakan.

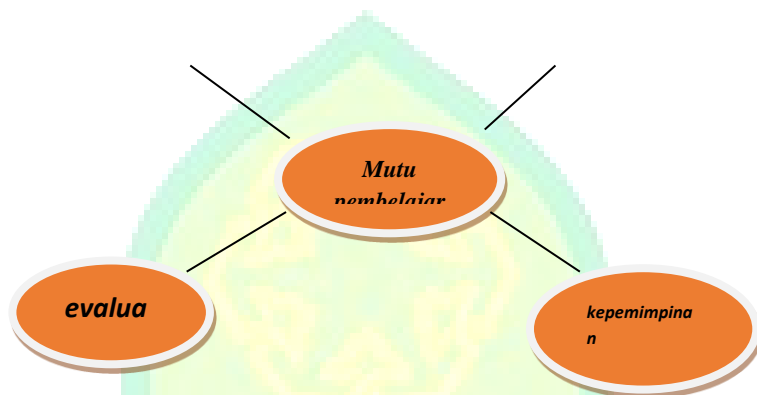
#### b. Pendekatan Makro Pendidikan

Ialah kajian pembelajaran dengan elemen yang lebih luas dengan elemen bagaikan berikut:

- 1) Standarisasi pengembangan kurikulum
- 2) Pemerataan serta persamaan, dan keadilan
- 3) Standar mutu
- 4) Keahlian bersaing.

Tinjauan makro pembelajaran menyangkut bermacam perihal, kalau pendekatan makro pembelajaran lewat jalan awal ialah: input sumber, proses pembelajaran serta hasil pembelajaran. Sebagaimana yang sudah dipaparkan, kalau

bundaran kualitas dalam revisi pendidikan, bagaikan satu komponen bundaran kualitas, bisa dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.2: Lingkaran Mutu Pembelajaran

Bersumber pada bagan diatas bisa dipaparkan kalau kualitas pendidikan lingkari oleh bermacam komponen, (1) Sistem; wajib di desain dengan baik oleh guru, dalam mengajar wajib mengenali apa yang hendak dikerjakannya, menekuni, membetulkan serta menyempurnakan tata cara serta prosedur, mencatat apa yang yang sudah diperoleh, (2) Strategi; guru dituntut buat memahami bermacam strategi dalam pendidikan buat diterapkan pada siswa dalam bermacam keadaan, (3) Kepemimpinan; dalam mengetuai proses pembelajarannya,(4) Penilaian; penilaian yang dicoba oleh guru sangat menunjang terhadap revisi mutu pendidikan berikutnya, sebab dengan penilaian, guru dapat mengenali celah- celah kelemahannya

dalam penerapan pendidikan yang berlangsung, (5) Motivasi: yang besar hendak menjadikan guru yang kreatif serta inovatif.<sup>61</sup> Serta proses pendidikan tersebut terdiri atas segala komponen modul pendidikan serta prosedur aktivitas belajar mengajar yang dicoba oleh guru yang hendak di informasikan kepada partisipan didik buat menggapai tujuan pendidikan yang mau dicapai. Ada pula khasiat Kualitas untuk dunia pembelajaran sebab, (a) tingkatkan pertanggung jawaban (akuntabilitas) sekolah kepada warga serta ataupun pemerintah yang sudah membagikan seluruh bayaran kepada sekolah, (b) menjamin kualitas lulusannya, (c) bekerja lebih professional, serta (d) tingkatkan persaingan yang sehat.<sup>62</sup>

Pendidikan ialah sesuatu sistem intruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang silih tergantung satu sama lain buat menggapai tujuan. Selaku sesuatu sistem, pendidikan meliputi sesuatu komponen, antara lain tujuan, bahan, partisipan didik, guru, tata cara, suasana serta penilaian.<sup>63</sup>

Supaya tujuan itu tercapai, seluruh komponen yang terdapat wajib diorganisasikan sehingga antar sesama komponen

---

<sup>61</sup> Ety Rochaety, dkk, "*Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*", 8.

<sup>62</sup> Husaini Usman, "*Manajemen teori Praktik & Riset Pendidikan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2008): 481.

<sup>63</sup> Anissatul Mufarokah, "*Strategi Belajar Mengajar*", (Yogyakarta: Teras, 2009): 43.

terjalin kerja sama. Oleh sebab itu, guru tidak boleh cuma mencermati komponen-komponen tertentu saja misalnya tata cara, bahan, serta penilaian saja, namun dia wajib memikirkan komponen secara totalitas. Membicarakan menimpa kualitas pendidikan maksudnya mempersoalkan gimana aktivitas pendidikan yang dicoba sepanjang ini berjalan dengan baik dan bisa menciptakan lulusan yang baik cocok dengan apa yang diharapkan. Dalam tingkatkan mutu pendidikan, hingga kita wajib mencermati menimpa sebagian komponen yang bisa pengaruhi pendidikan.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar,(Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 43

<sup>64</sup> Martinis Yamin dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas Strategi Meningkatkan Mutu Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Persada,2009), hal. 164-166

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. METODE DAN PENDEKATAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa “Pendekatan Kualitatif” menjadi suatu langkah penelitian yang memproduksi data deskriptif serupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan sikap (tindakan) yang perlu diamati.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif mempunyai beberapaciri-ciri yang berbeda dengan penelitian lainnya. Bogdan dan Biklen menyampaikan lima karakteristik yang bertaut pada penelitian kualitatis, yaitu: *naturalistic, descriptive data, concern with process, inductive, and meaning*.<sup>2</sup> Sedangkan Lincoln dan Guba menganalisis10 (sepuluh) ciri-ciri penelitian kualitatif, yakni: latar alamiah, peneliti sebagai instrument kunci, analisis data

---

<sup>1</sup>Robert C. Bogdan & S.J. Taylor, “*Introduction to Qualitative Research Methods*”, (New York: Jon Wiley, 1975): 5.

<sup>2</sup>Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, “*Qualitative Research For Education: An Introduction to teory and Methods*” (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982): 4.

secara induktif, *grounded theory*, deskriptif, lebih mengutamakan proses daripada hasil.<sup>3</sup>

## **B. DATA DAN SUMBER DATA**

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya.<sup>4</sup>Berkaitan dengan hal itu, sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah: kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan statistik.

Pertama, **kata-kata**. Kata-kata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kata-kata orang-orang yang diwawancarai atau informan, yaitu: kepala sekolah, tata usaha, guru dan staff SDN 1 Jetis Lor.

Kedua, **tindakan**, Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan orang-orang yang diamati, yaitu: kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan Kepala Sekolah SDN 1 Jetis Lor.

Ketiga, **sumber tertulis**, Walaupun sumber data tertulis merupakan bukan sumber data yang pokok, tetapi pada

---

<sup>3</sup>Lincoln & Guba, "*Effective Evaluation*", (San Fransisco: Jossey-Bass PUBLisers, 1981): 39-44.

<sup>4</sup>Lofland, "*Analyzing Socizl Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*" (Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984): 47.

tahap peneliti tidak dapat menghilangkan dari sumber data tertulis sebagai data pendukung. Diantara sumber data tertulis dalam penelitian ini ialah menghasilkan wawancara dan observasi di SDN 1 Jetis Lor.

Keempat, **foto**. Dalam penelitian ini, foto digunakan sebagai sumber data penguat hasil observasi, karena pada tataran realitas foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Dalam penelitian ini ada dua katagori foto, yaitu foto yang dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Sedangkan foto yang dihasilkan oleh peneliti adalah foto yang diambil peneliti di saat peneliti melakukan pengamatan berperan serta di SDN 1 Jetis Lor Sebagai contoh adalah kegiatan jam tambahan, kebijakan pendidikan yang dilakukan dalam peningkatan mutu dalam bidang olahraga, pramuka, agama dan sebagainya.

Kelima, **data statistik**. Yang diartikan data statistik pada penelitian ini, yaitu bukan statistik sebagai alat analisis seperti yang digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis, tetapi statistik itu menjadi data. Artinya data statistik yang telah ada akan dijadikan peneliti sebagai bahan

data tambahan. Sebagaimana contoh adalah data statistik bentuk kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan mutu sekolah.

### **C. METODE DAN TEKNIK PENGALIAN DATA**

Metode penelitian yang dipakaipada penelitian ini adalah *case studies*, yaitu jenis studi etnografi yang mendukungnya pada satu unit, seperti: individu, satu kelompok, satu organisasi, atau satu program. Tujuannya adalah untuk mencapai pada uraian dan pemahaman yang terperinci terhadap entitas ("kasus"). Selain itu, studi kasus dapat menghasilkan data dari mana generalisasi ke teori mungkin.<sup>5</sup>

Penggunaan penggalian data pada proses penelitian kali ini, meliputi:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Segi pelaksanaan pengumpulan data dari segi observasi bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: pertama observasi berperan serta (*participant observation*) dan observasi tidak

---

<sup>5</sup> Donald Ary, Et.al. "Introduction to Research in Education", (Canada: Ceangege Learning,2010): 29.



berperan serta (*non participant observation*). Kemudian dari segi instrumentasi yang digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi dua ialah observasi terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>6</sup>

Dilakukannya pengamatan secara gejala dan sistematis mengenai fenomena sosial dari gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung kondisi lapangan, bagaimana proses kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SDN 1 Jetis Lor.

## 2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan percakapan yang bermaksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Penggunaan wawancara sebagai suatu teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan agar mendapatkan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal apapun

---

<sup>6</sup>Sugiono, "*Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2007): 203-205.

<sup>7</sup>P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*", (Jakarta: PT Rineka Citra, 2004): 63.

dari responden yang lebih mendalam jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>8</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang dianggap mampu, mengerti dan mendalami tentang suatu proses kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah ialah orang-orang yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini, menetapkannya dengan menggunakan cara *purposive*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pujiono, S.Pd, kepala SDN 1 Jetis Lor karena beliau sebagai penanggungjawab atas semua kegiatan yang ada di sekolah dan pembuat kebijakan.
- b. Sukirno, S.Pd, Waka kurikulum SDN 1 Jetis Lor
- c. Tri Haryani, S.Pd. sebagai guru kelas sekaligus pengerak kebijakan yang diambil kepala sekolah.
- d. Dian Rahayu, S.Pd. sebagai guru sekaligus tim pengurus kebijakan dalam bidang kesenian dan Pramuka.

### 3. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dari hasil suatu penelitian yang telah dilakukan, teknik dokumentasi terdiri dari dokumen dan rekaman. “Rekaman” merupakan pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 194.

tertulis dan tersusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian terhadap peristiwa. Sedangkan “Dokumen” merupakan bahan tertulis ataupun film, lain dari teknik dokumentasi yang berupa rekaman karna tidak adanya persiapansebab adanya permintaan seorang peneliti.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumen yang digunakan karena seluruh dokumen perihal informasi berupa dokumen data tertulis (meliputi pelaksanaan pengambilan kebijakan, agenda kegiatan rutin dan foto-foto terkait hal tersebut) kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### **D. ANALISIS DATA**

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif<sup>10</sup> mengikuti konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh aktivitas dalam analisis data, meliputi:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008): 333-334.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 333-334.

<sup>11</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, “*Analisis Data Kualitatif, Terj. Rohendi Rohidi*”, (Jakarta: UI Press, 1992): 16.

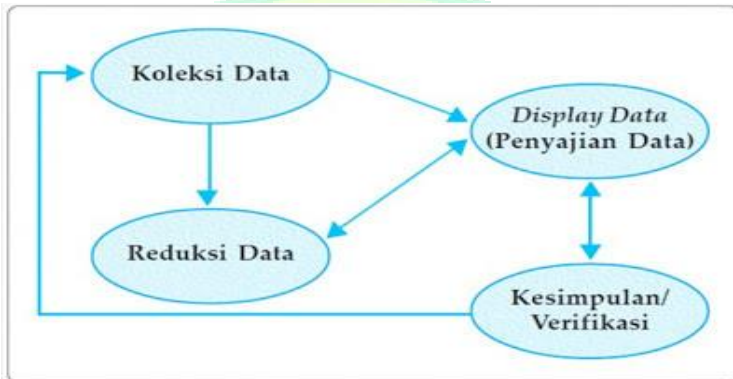
1. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data-data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.<sup>12</sup>
2. Penyajian Data adalah beberapa informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk menarik suatu kesimpulan dan mengambil tindakan penelitian. Pada tahap ini peneliti juga melakukan *Display* (Penyajian) data secara sistematis dengan tujuan lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks secara utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Dalam proses ini, data diklarifikasi berdasarkan tema-tema inti.<sup>13</sup>
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi. Pada analisis data ini penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi secara lengkap. Kesimpulan atau verifikasi ini juga dikonfirmasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang sering muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga kebenarannya

---

<sup>12</sup>Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008): 209.

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 288.

terjamin.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, langkah-langkah analisis data dengan pendekatan ini dapat dijadikan sebagai berikut:



Gambar 3.1

Model Analisis Data Miles dan Huberman

## E. PEMBAHASAN DATA

### 1. Perumusan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan di SDN 1 Jetis Lor di buat berdasarkan aspirasi wali murid dan disampaikan kembali oleh kepala sekolah sebagai hasil dari perumusan kebijakan. Adapun tahap-tahap yang dilalui adalah melalui perencanaan kebijakan dengan menentukan kebutuhan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, 209-210.

apa saja yang diperlukan sekolah, formulasi kebijakan dengan menentukan sasaran dan target dalam kebijakan yang akan disusun dan pengadopsian kebijakan dengan mengacu pada kebijakan sebelumnya.

## 2. Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh guru dan dimonitori langsung oleh Kepala Sekolah. Dalam pelaksanaan pendidikan ini guru sebagian pelaksanaan pendidikan digunakan berdasarkan hasil dari pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan ini selalu mengacu pada hasil perumusan kebijakan yang telah ditentukan.

## 3. Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Bentuk evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan dilakukan secara bertahap untuk menjaga hasil output dari pembelajaran tersebut berdasarkan pada mutu pembelajaran yang mengacu pada visi, misi dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Evaluasi ini dilakukan secara berkala setiap bulan untuk mengetahui kekurangan dari pelaksanaan kebijakan pembiayaan pembelajaran.

**BAB IV**  
**PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN**  
**PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU**  
**PEMBELAJARAN DI SDN 1 JETIS LOR**

**A. PAPARAN DATA**

Berdasarkan data yang didapat dalam proses penelitian peneliti menemukan beberapa bentuk pembuatan kebijakan pembiayaan pendidikan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 bahwa sumber pembiayaan dalam pendidikan dapat diperoleh melalui pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing, dan sumber lain yang sah. Berdasarkan temuan dilapangan masih banyak terdapat lembaga yang mengalami masalah pada pembiayaan sehingga berdampak pada mutu pendidikan yang dihasilkan.<sup>1</sup> Selain itu peneliti juga menemukan data dari yang menyatakan bahwa “Perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan di SDN 1 Jetis Lor dilakukan secara bertahap dan teorganisir dengan baik. Kebijakan diformulasikan berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah terjadi. Dengan begitu kebijakan akan tersusun dengan sasaran dan tujuan yang selaras. Kebijakan disusun berdasarkan

---

<sup>1</sup>*Sumber Detiknews, Senin 05 November 2018, Pukul 11: 14 WIB)*

hasil rapat atas penyusunan kebijakan. Sekolah menyusun organisasi pengurus dalam penyusunan kebijakan agar bisa lebih fokus atas tujuan utama dari pembuatan susunan organisasi. SDN 1 Jetis Lor menyusun organisasi khusus dengan melibatkan pengawas sekolah dan komite sekolah agar transparan satu sama lain”.<sup>2</sup>

Dalam penyusunan kebijakan, peneliti menemukan persamaan dengan undang-undangan kebijakan pusat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Dian rahayu yang menyatakan bahwa:

“selain kebijakan ini ada juga mengacu pada kebijakan pusat yang menyatakan bahwa sumber pembiayaan dalam pendidikan dapat diperoleh melalui pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing, dan sumber lain yang sah. Maka dari itu, kebijakan ini dianalisis dengan sumber dana secara rinci agar terdapat jelas hasil dana dari mana saja”.<sup>3</sup>

Selain itu, nunik menyatakan bahwa:

“sumber pembiayaan ini dikelola sebaik mungkin dengan mengadakan secara berkala baik secara rapat besar ataupun rapat tim coordinator tentang pembiayaan. Biasanya

---

<sup>2</sup> Pujiono, Kepala Sekolah, “Perencanaan Kebijakan pembiayaan yang dilakukan/evaluasi program”, *Dokumentasi*, Tanggal 7 Oktober 2020, Pukul. 08.00 WIB.

<sup>3</sup> Dian, , guru kelas, “Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, *wawancara* ,Tanggal 12 September 2020, Pukul 10.00 WIB.



pembiayaan ini dianalisis berdasarkan hasil pertanggungjawaban pembiayaan yang sudah disepakati. Para anggota rapat akan menganalisis ulang tentang kebutuhan yang ada di sekolah dengan memprioritaskan kebutuhan dari lembaga.”<sup>4</sup>

Dari dokumen rencana kerja sekolah ditemukan bahwa dalam perencanaan kebijakan disusun berdasarkan visi dan misi dan tujuan pendidikan dari lembaga tersebut. Tujuan dari perencanaan tersebut agar penyusunan pembiayaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembiayaan.<sup>5</sup>

## **B. ANALISIS DATA**

Berdasarkan hasil paparan data diatas, menyatakan bahwa terdapat beberapa tahap dalam perumusan kebijakan mulai dari agenda kebijakan, formulasi pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Hal ini diperkuat dengan hasil data yang menyatakan bahwa Selain itu peneliti juga menemukan data dari yang menyatakan bahwa Perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan di SDN 1 Jetis Lor dilakukan secara bertahap dan teorganisir dengan baik. Kebijakan diformulasikan berdasarkan analisis kebutuhan yang

---

<sup>4</sup> Nunik, guru kelas, “Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan”, wawancara, Tanggal 16 September 2020, Pukul 10.00 WIB.

<sup>5</sup> Agus Setiyawann, Guru Kelas, ”Visi dan Misi Sekolah, ruang Kepsek”, *Dokumentasi*, tanggal 16 september, 2020, Pukul 12,00 WIB.

sudah terjadi. Dengan begitu Kebijakan akan tersusun dengan sasaran dan tujuan yang selaras. Kebijakan disusun berdasarkan hasil rapat atas penyusunan kebijakan. Sekolah menyusun organisasi pengurus dalam penyusunan kebijakan agar bisa lebih fokus atas tujuan utama dari pembuatan susunan organisasi. SDN 1 Jetis Lor menyusun organisasi khusus dengan melibatkan pengawas sekolah dan komite sekolah agar transparan satu sama lain.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam perumusan kebijakan terdapat beberapa tahap meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan.<sup>7</sup>

Penyusunan agenda disusun berdasarkan hasil rapat bersama dalam membahas penyusunan kebijakan. Penyusunan agenda ini disusun secara transparan dengan mengacu sasaran dan tujuan dari adanya kegiatan-kegiatan yang ada. Hal ini diperkuat dengan hasil data lapangan yang menyatakan bahwa kebijakan disusun berdasarkan hasil rapat atas penyusunan kebijakan. Sekolah menyusun organisasi pengurus dalam penyusunan kebijakan agar bisa lebih fokus atas tujuan utama

---

<sup>6</sup> Pujiono, Kepala Sekolah, “ Kegiatan Perumusan Pelaksanaan Kebijakan”, *observasi*” tanggal 18 Februari 2020, Pukul 08.00 WIB.

<sup>7</sup>Hasbullah, "*Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia.*" (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015): 64.

dari pembuatan susunan organisasi. SDN 1 Jetis Lor menyusun organisasi khusus dengan melibatkan pengawas sekolah dan komite sekolah agar transparan satu sama lain.<sup>8</sup>

Kebijakan diformulasikan berdasarkan hasil analisis bersama dengan mengacu analisis SWOT yang sudah dibuat bersama dalam rapat. Adapun implementasi dilaksanakan berdasarkan hasil penyusunan hasil kebijakan bersama. Kebijakan dievaluasi dengan melakukan rapat secara berkala. Evaluasi kebijakan melibatkan wali murid untuk mengetahui hasil rapat evaluasi yang dihadiri oleh guru, pengawas sekolah dan komite sekolah. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh SDN 1 Jetis Lor dievaluasi bersama oleh peri kehidupan, bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Dunn, membuat rincian tahapan proses pembuatan kebijakan, seperti yang digambarkan pada table berikut:

---

<sup>8</sup> Pujiono, Kepala Sekolah,” Struktur Kebijakan Pembiayaan di SD N 1 Jetis Lor” *observasi* “ tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB .

<sup>9</sup>Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia.*

| <b>FASE</b>                | <b>KARAKTERISTIK</b>  | <b>ILUSTRASI</b>   |
|----------------------------|---|--|
| <b>PENYUSUNAN AGENDA</b>   | <p>Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.</p> | <p>Penyusunan agenda diawali pada saat kepala sekolah melihat keluhan yang dirasakan oleh guru honorer kurangnya mutu pembelajaran yang didapat siswa. hal tersebut langsung disampaikan komite, dan selanjutnya komite merumuskannya dalam sebuah rapat komite.</p> |
| <b>FORMULASI KEBIJAKAN</b> | <p>Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. alternatif kebijakan</p>   | <p>Komite dan kepala sekolah membuat kebijakan pembiayaan untuk meningkatkan mutu</p>  |

| <b>FASE</b>             | <b>KARAKTERISTIK</b>   | <b>ILUSTRASI</b>   |
|-------------------------|--|--|
|                         | <p>melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.</p>        | <p>pembelajaran. Terdapat dua konteks yang perlu dipahami bagaimana kebijakan pembiayaan bisa tercapai, dengan ketentuan mutu pendidikan sesuai yang di inginkan. Berdasarkan hal tersebut, perlunya sebuah kebijakan pendidikan dibuat.</p> |
| <b>ADOPSI KEBIJAKAN</b> | <p>Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus diantara</p> | <p>Kebijakan diadopsi dari bagaimana guru memberikan tambahan pembelajaran dan</p>   |

| <b>FASE</b>                   | <b>KARAKTERISTIK</b>  | <b>ILUSTRASI</b>   |
|-------------------------------|---|--|
|                               | direktur lembaga, atau keputusan pengadilan.  | ekstrakurikuler kepada peserta didik. Dengan ketentuan guru memberikan sumber pendanaan dari wali murid  |
| <b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN</b> | Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. | Kegiatan-kegiatan dalam implementasi kebijakan dilakukan setelah pembelajaran berlangsung, untuk mengulas atau memberikan pembelajaran yang belum dipahami, sedangkan untuk extra dilakukan pada hari jumat, sabtu. Meliputi ekstra pramuka, reog, tari-tarian dan olahraga. |
| <b>PENILAIAN KEBIJAKAN</b>    | Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam   | Penilaian kebijakan dilakukan setiap   |

| FASE | KARAKTERISTIK  | ILUSTRASI  |
|------|--|--|
|      | <p>pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.</p> | <p>satu minggu sekali, oleh kepala sekolah dan tiga bulan sekali dilakukan oleh wali murid dan komite.</p> |

Tabel 3.1

### Rincian Tahapan Pembuatan Kebijakan Menurut Dunn

#### **C. SINTESIS**

Berdasarkan paparan diatas dapat diklarifikasikan bahwa perumusan kebijakan pembiayaan yang dibuat sesuai kebutuhan dan rencana yang sudah di buat. hal tersebut dilihat dari bagaimana perumusan tersebut dilakukan dengan bertahap, melalui proses yang dilakukan oleh komite, kepala sekolah dan guru. Perencanaan dimulai dari penyusunan agenda, formasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan

penilaian kebijakan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menunjang berjalannya sebuah kebijakan, serupa dengan pemaparan yang dilakukan oleh Duun, Dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan demi tahapan, di mana dimana antara tahapan satu dengan tahapan yang lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan pendidikan, maka akan banyak dikaji dan diteliti, sebab akibat dan kinerja kebijakan. Namun, dalam perumusan kebijakan sebaiknya diatur dan direncanakan dengan baik. Agar tingkat partisipasi dalam musyawarah dengan komite dapat terstruktur dengan baik. Hal yang sangat penting untuk dihindari dalam pengambilan sebuah keputusan adalah jika kebijakan yang diambil ternyata keliru maka akan berdampak negative untuk lembaga. Sehingga kebijakan yang diambil tidak akan efektif dalam proses implementasinya.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup>Hasbullah, "*Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi*", 65.



**BAB V**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN  
PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU  
PEMBELAJARAN DI SDN 1 JETIS LOR**

**A. PAPARAN DATA**

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari kepala sekolah telah dikemukakan yang melatarbelakangi adalah karena para guru merasa masih kurangnya kesejahteraan dalam pembiayaan. Kurangnya jam pembelajaran yang diterima murid dalam peningkatan pembelajaran, pembiayaan dari pemerintah kenyataannya belum bisa mencukupi kebutuhan sekolah, sehingga pembelajaran yang dilakukan juga belum bisa maksimal. Hal ini menyebabkan sekolah harus lebih kreatif mencari sumber pendanaan yang mampu menompang pembiayaan dari pemerintah, SDN 1 Jetis Lor merupakan Sekolah Dasar Negeri yang dalam pembiayaannya tidak hanya menggantungkan sumber pembiayaan utama dari pemerintah. Sekolah memiliki program-program yang mampu memberikan sumbangan dana yang dialokasikan kedalam pengelolaan pembelajaran. sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai bagaimana mutu pembelajaran di sekolah ini masih kurang, dikarenakan permasalahan waktu, dan disisi lain permasalahan

pembiayaan yang menyebabkan guru belum sepenuhnya paham dengan tugasnya sebagai seorang pengajar, maka selaku kepala sekolah saya membuat kebijakan tersebut untuk menjembatani apa yang menjadi permasalahan tersebut.<sup>1</sup>

Realitas diatas adalah sebuah masalah yaitu kurangnya bentuk kebijakan dalam mencapai tujuan sekolah. Dengan melihat hal itu sulit akan tercapainya mutu yang diinginkan. Menurut Sukirno selaku guru di SDN 1 Jetis Lor mengatakan “guru-guru GTT banyak yang masih belum bisa fokus pada mengajar, hal tersebut dikarenakan meraa masih merasa kurang kesejahteraan yang didapat dari sekolahan”.Hal tersebut juga terlihat dari wawancara yang di paparkan dari bapak Pujiono “kebijakan yang dibuat semuanya tidak terlepas dari kesejahteraan guru tersebut.<sup>2</sup>

Banyak hal berkaitan dengan pengaitan ketika sebuah sekolah menginginkan atau tercapainya sebuah mutu. Pada bidang pendidikan mutu dibagi menjadi mutu input, proses, output dan outcome. Input pendidikan disebut mempunyaimutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu jika mampu

---

<sup>1</sup>Sugeng arianto, Guru, “Observasi awal Sekolahan”, di SD N 1 Jetis Lor, *Observasi*, tanggal 6 Oktober 2019, Pukul 08.00 WIB.

<sup>2</sup> Pujiono, Kepala Sekolah, “Perencanaan Kebijakan Pembiayaan Yang Dilakukan/Evaluasi Program”, Di Ruang Kepala Sekolah, *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 08.00.

menciptakan suatu suasana pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAKEM).<sup>3</sup> “Melihat teori tersebut kaitannya sesuai dengan wawancara Guru harus senantiasa aktif dalam kebijakan tersebut, skill guru, dan kepekaan guru diperlukan untuk meningkatkan kebijakan pembiayaan”.<sup>4</sup>

Adapun bentuk partisipasi guru terkait pelaksanaan kebijakan pembiayaan meliputi ikut membaantu dalam melaksanakan kebijakan tersebut melalui pembelajaran seperti optimalisasi pembelajaran dengan melengkapi sarana- prasana dalam proses pembelajaran.<sup>5</sup>“ Kemampuan guru juga dikontrol dengan evaluasi bersama dari kepala sekolah dan pelaksanaan KKG(kelompok kerja guru) pada setiap bulan”.<sup>6</sup>

Peningkatan mutu dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh input dan faktor proses manajemen pendidikan. untuk input pendidikan merupakan segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan

---

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta : (Bandung : Al-Ma'arif, 1984),110

<sup>4</sup> Sukirno, Guru, “Perencanaan Kebijakan Pembiayaan Yang Dilakukan”, Ruang Kelas, *Wawancara*, Tanggal 09 September 2020, Pukul 08.00 WIB.

<sup>5</sup> Sukirno, guru, “Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan”,*Observasi*, Tanggal 03 Februari 2020, Pukul 08.00 WIB.

<sup>6</sup> Sukirno, Guru, “Perencanaan Kebijakan Pembiayaan Yang Dilakukan”, Ruang Kelas, *Wawancara*, Tanggal 09 September 2020, Pukul 08.00WIB.

terdiri dari seluruh sumber daya sekolah. sedangkan menurut Subagio terdiri dari *man, money, policy*.<sup>7</sup> sumber daya sekolah harus saling mendukung sama lain dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut. Adapun sumber daya yang ada di SDN 1 Jetis Lor meliputi kepala sekolah, guru, komite dan wali murid sebagai man( pelaku), sumber uang terdiri baik dari bantuan operasional sekolah, uang dari wali murid dan uang komite. Selain itu menurut Dian“Bentuk kebijakan dari lembaga ini terdiri dari kebijakan kurikulum dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama oleh pihak yang terlibat”.<sup>8</sup>

## **B. ANALISIS DATA**

Adapun dalam penerapan data pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SDN 1 Jetis Lor. Biaya pendidikan sebagai salah satu komponen masukan instrumental input yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan disekolah, dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang

---

<sup>7</sup>Subagio Atmodiwirio, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Ardadizya Jaya: Jakarta,2002) 22.

<sup>8</sup> Dian Rahayu,Guru, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, Taman Sekolah,, wawancara, Tanggal 12 September 2020, Pukul 10.00 WIB.

bersifat kuantitatif biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hampir tidak ada pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak dapat berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cangkupan yang sangat luas yakni, semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.<sup>9</sup> Apabila pelaksanaan benar-benar dilakukan dengan benar, secara prosedur menurut saya mutu pembelajaran akan tercapai.<sup>10</sup>

Disini dari hasil wawancara hasil wawancara yang menjalankan pelaksanaan sepenuhnya oleh guru kelas, guru mata pembelajaran dan sebagian diambilkan luar untuk pramuka dan hal lain yang guru belum menguasai.<sup>11</sup> Hal ini diperlukan untuk mengangkat kebijakan yang dibuat khususnya supaya kebijakan pembiayaan sekolah tersebut bisa dijalankan sesuai

---

<sup>9</sup> Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana & Anak Agung Gede Agung “Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng” *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan. Volume 6, No 1 Tahun 2015.*

<sup>10</sup> Sugeng Arianto, Guru, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, di Ruang guru, wawancara, Tanggal 12 September 2020, Pukul 09.00 WIB.

<sup>11</sup> Sukirno, Guru, “Perencanaan Kebijakan Pembiayaan Yang Dilakukan”, Ruang Kelas, *Wawancara*, Tanggal 09 September 2020, Pukul 08.00 WIB.

dengan tujuannya, rapat komite yang dikeluarkan oleh sekolah, hal disamping ialah kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan lebih rumit dibandingkan problem pembelajaran yang hendak diatasi ataupun dipecahkan. kebijakan pembelajaran yang diformulasikan pula sebaiknya membagikan harapan baru untuk masyarakat negeri kalau mereka bisa menempuh hari besok yang jauh lebih baik sehabis kebijakan pembelajaran itu diimplementasikan. dan, kebijakan pembelajaran yang diformulasikan haruslah mendesak produktivitas, mutu, serta perikehidupan, bersama dalam bidang pembelajaran secara efisien serta efektif.<sup>12</sup> hal tersebut dikaitkan oleh Eri, menurutnya:

“Pelaksanaan pembiayaan disini dibuat untuk membantu guru honorer mendapat tambahan gaji yang diperoleh, tapi dengan syarat guru tersebut harus menambah jam pelajaran yang diberikan kepada siswa, dengan itu dilakukan jam tambahan diharapkan siswa akan jauh lebih fokus dan paham karena didampingi guru”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Hasbullah, "*Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*".(Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2015): 64.

<sup>13</sup>Eri Widiarti,Komite, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, di Taman Sekolah, *wawancara*, tanggal 16 September 2020, Pukul 08.00.

Tanggapan lain juga menanggapi pelaksanaan tersebut berdampak sebagai berikut:

“Ada beberapa dampak yang dirasakan dari kebijakan tersebut, *pertama* untuk guru ialah sedikit menambah imbalan yang didapat dari sekolah dengan memberikan jam pelajaran, guru juga diharuskan lebih bertanggung jawab dengan tugasnya karena sedikit banyak ditambahi dana dari orang tua”.<sup>14</sup>

Kenapa pembiayaan harus ditekankan dalam hal ini salah satu faktor yang membagikan pengaruh terhadap kenaikan kualitas serta kesesuaian pembelajaran merupakan pembiayaan pembelajaran yang mencukupi. Sekolah wajib mempunyai dana yang lumayan buat menyelenggarakan pembelajaran. Oleh sebab itu, pembiayaan wajib dikelola secara transparan. Jadinya harus diutamakan ialah pembiayaan dari seorang guru demi tercapainya mutu yang diinginkan.<sup>15</sup> Dari pemaparan tersebut perlunya sumber pembiayaan yang menyokong itu semua tidak hanya sekolah, melihat minimnya pendanaan dari sekolah perlunya sumber lain, hal tersebut diutarakan oleh perwakilan

---

<sup>14</sup> Dian Rahayu, Guru, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, Taman Sekolah, *wawancara*, Tanggal 12 September 2020, Pukul 10.00 WIB.

<sup>15</sup>Subagio Atmodiwirio, “Manajemen Pendidikan Indonesia”, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2002): 22.

komite Eri Widiarti bahwa “pembiayaan sepenuhnya dari orang tua siswa yang anaknya ingin mengikuti tambahan program tersebut”.<sup>16</sup>

Hal ini diperkuat lagi oleh Dian Rahayu yang mengatakan pembiayaan disini bagi murid yang ingin mengikuti kebijakan tersebut disini sumber dana wali murid membayar 25 ribu satu bulan.<sup>17</sup> Hal itu sesuai dengan biaya pendidikan yang mana dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengambilan berupa barang atau layanan jasa dalam rangka pencapaian tujuan di bidang pendidikan. Biaya ialah suatu faktoryang mengontetikanpadaprosedur penganggaran.<sup>18</sup>

Ketika pembiayaan sudah dijalankan maka tugas guru yang melakukan kegiatan bagaimana kita melaksanakan dengan yang diharapkan, untuk pelaksanaan sendiri sesuai yang dikatakan Sukirno ialahguru harus senantiasa aktif dalam kebijakan tersebut, skill guru, dan kepekaan guru diperlukan

---

<sup>16</sup> Eri Widiarti, Komite, Perencanaan, Kebijakan pembiayaan yang dilakukan, di Taman Sekolah, *wawancara*, tanggal 16 September 2020, Pukul 08.00.

<sup>17</sup> Dian Rahayu, Guru, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, Taman Sekolah, *wawancara*, Tanggal 12 September 2020, Pukul 10.00 WIB

<sup>18</sup>Subagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*.



untuk meningkatkan kebijakan pembiayaan.<sup>19</sup> Jadinya semua harus mengasah skill yang di miliki, untuk waktu pelaksanaan kegiatan tersebut ialah bimbingannya melalui jam tambahan sewaktu pulang sekolah, dan mungkin sabtu sore.<sup>20</sup> Adapun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pemaparan dokumentasi yang terlihat, Kegiatan pelaksanaan pembiayaan sekolah, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di SDN 1 Jetis Lor, diantaranya ialah kegiatan pendidikan yang meliputi pelajaran-pelajaran tambahan di sekolah, hal ini mencakup semua yang diajarkan guru disekolah, kegiatan tersebut dilaksanakan sepulang sekolah seperti kursus tapi yang melaksanakan bapak ibu guru, kegiatan dilaksanakan dengan membahas materi yang sekiranya masih belum paham. Kegiatan tersebut mencakup kelas satu sampai kelas empat dengan kondisi waktu yang berbeda, kelas satu dan dua dimulai dari 10:00 sampai 12:00 sedangkan kelas tiga sampai kelas enam dari jam 12:00-14.30. Kegiatan tersebut sudah termasuk kegiatan sholat berjamaah dan makan siang bersama disekolah.

---

<sup>19</sup> Sukirno, Guru, “Perencanaan Kebijakan Pembiayaan Yang Dilakukan”, Ruang Kelas, *Wawancara*, Tanggal 09 September 2020, Pukul 08.00 WIB.

<sup>20</sup> Farel, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, di Ruang Kelas VI, *wawancara*, tanggal 17 September 2020, Pukul, 07.00 WIB.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin sampai kamis.

Selain kegiatan pendidikan ada juga kegiatan keagamaan yang mencangkup dari semua kelas dengan materi berdasarkan tingkat kelas, keagamaan tersebut dilaksanakan berdasarkan aspek kegiatan masyarakat dan orang tua yang menginginkan anaknya selain bisa ilmu pengetahuan juga ilmu agama, materi agama tersebut meliputi baca tulis Al-Qur'an dan ibadah sholat, zakat dan pengenalan agama-agama yang ada. Wali murid berharap bisa membaca menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kegiatan tersebut dilakukan seminggu sekali dengan mengadopsi pendidikan TPA di masyarakat setempat. Selain itu juga terdapat kegiatan olahraga, yaitu semacam pengolahan bakat bagi anak-anak yang mempunyai bakat olahraga yang meliputi bola voli, ping pong dan sepak bola, kegiatan tersebut dilaksanakan di akhir pekan. Kegiatan ini sifatnya hanya siapa yang tertarik tidak ada kewajiban semua siswa. Kegiatan Pramuka juga dilaksanakan di lembaga ini dengan mengambil pembina yang berasal dari luar dengan tujuan sesuai dengan kebutuhan yaitu menguasai ilmu kepramukaan.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan siswa dapat menambah kekompakan dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan selain juga pramuka menjadi

kegiatan wajib yang harus dikeluarkan setiap tahunnya, untuk diperlombakan. Hal ini menjadi nilai positif untuk membuat anak menunjukkan bakatnya dalam hal baris-berbaris, tali temali, dan sebagainya. seni budaya juga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di SDN 1 Jetis Lor dikarenakan ikon sekolah ini adalah sekolah yang mengakulturasikan sekolah dasar dan Budaya sebagai ikon sekolah tersebut. Dikarenakan tidak terlepas dari sosok Sugeng Arianto dan Dian Rahayu yang selaku pengajar yang menjadi icon reog yang namanya sudah tidak asing dikalangan masyarakat setempat. Hal tersebut menjadikan kegiatan kesenian dan budaya di SDN 1 Jetis Lor lebih dikenal masyarakat dengan kegiatan reog Ponorogo dan tari tradisional yang sudah menjadi ikon sekolah, yang setiap kalinya tampil dikalangan masyarakat setempat. Menjadi iklan promosi yang terbukti berhasil.<sup>21</sup>

Dari komentar diatas bisa disimpulkan kalau kesesuaian antara perencanaan yang terbuat guru dengan pelaksanaan maupun silabus yang terbuat guru dengan kebutuhan siswa, hingga proses pendidikan tersebut dikira bermutu. Dengan terdapatnya kecocokan dengan kebutuhan ini, bisa disimpulkan kalau kecocokan waktu mengajar yang diseleksi, strategi yang

---

<sup>21</sup> Sukirno, guru, “Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan”, *Observasi*, Tanggal 03 Februari 2020, 08.00 WIB

di pakai serta tata cara yang dipakai guru yakni sesuai dengan tingkatan siswa yang menerimanya.

Didalam pembelajaran, kualitas merupakan sesuatu keberhasilan dalam proses belajar yang mengasyikkan serta membagikan kenikmatan. Pelanggan dapat berbentuk mereka yang langsung jadi penerima produk serta jasa tersebut. Hingga dalam konteks penafsiran kualitas pada pembelajaran, perihal ini mengacu pada proses pembelajaran serta hasil pembelajaran tersebut.

Dalam proses pembelajaran yang bermutu ikut serta bermacam input semacam, bahan ajar (kognitif, afektif serta psikomotorik), metodologi (bermacam- macam cocok dengan keahlian tiap- tiap guru), fasilitas sekolah, sokongan administrasi, fasilitas prasarana serta sumber energi yang lain dan terciptanya atmosfer yang kondusif. Manajemen sekolah, sokongan kelas berperan mensinkronkan bermacam input tersebut ataupun mensinergikan seluruh komponen dalam interaksi(proses) belajar mengajar yang baik antara guru, siswa serta fasilitas pendukung dikelas ataupun diluar kelas, dari konteks kurikuler ataupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis ataupun yang non akademis dalam atmosfer yang menunjang proses pendidikan Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang tela

dicapai selama ini oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah setiap akhir semester, akhir tahun, dua tahun atau lima tahun, bahkan sepuluh tahun). Prestasi yang telah dicapai atau hasil dari pendidikan (*student achievement*) tersebut dapat berupa hasil tes kemampuan akademis siswa, misal: ulangan harian, ulangan umum, ujian semester dan ujian akhir semester.

Melihat kebijakan yang dibuat tersebut hal yang melatarbelakangi selain faktor pembiayaan, disisi lain ialah faktor bagaimana SDN 1 Jetis Lor selaku sekolah negeri, ingin bersaing dengan sekolah swasta yang menawarkan berbagai macam kegiatan tambahan, yang tidak kalah bagus dari sekolah swasta hal itu terlihat dari misi sekolah yang tertulis mengembangkan ilmu pada suatu bidang IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), bahasa-bahasa asing, olahraga dan seni budaya disesuaikan dengan bakat, minat dan potensi siswa. Dengan hal tersebut muncul kegiatan yang diadakan di SDN 1 Jetis Lor seperti, TPA, di sekolah, latihan menari, latihan reog, pengembangan jiwa pramuka, dan kegiatan lainya yang mengasah bakat anak. Tujuan dari penciptaan lulusan SDN 1 Jetis Lor kedepannya bisa mengembangkan bakat yang dimiliki, hal ini sesuai dengan teori

Hari Sudrajat mengemukakan bahwa pembelajaran yang bermutu merupakan pembelajaran yang sanggup menciptakan

lulusan yang mempunyai keahlian ataupun kompetensi, baik kompetensi akademik ataupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi dengan kompetensi personal serta sosial, dan mempunyai nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya ialah kecakapan hidup (*life skill*), lebih lanjut Sudrajat pula mengemukakan pembelajaran bermutu yakni pembelajaran yang sanggup menciptakan manusia seutuhnya (manusia paripurna) ataupun manusia dengan karakter yang integral (*integrated personality*) ialah mereka yang sanggup mengintegrasikan iman, ilmu serta amal.<sup>22</sup>

Untuk mencapai sebuah mutu pembelajaran yang diinginkan, semua faktor harus dapat berjalan dengan beriringan, para pelaku didunia pembelajaran menyadari keharusan mereka untuk mencapai suatu kualitas pendidikan tersebut serta menyampaikan kepada siswa. Oleh sebab itu, terdapat banyak aspek yang bisa jadi ciri kualitas pendidikan, misalnya: gedung yang bagus, guru yang termuka, nilai moral yang besar, hasil tes yang memuaskan. Spesialisasi ataupun kejuruan, dorongan orangtua, bisnis serta komunitas lokal, sumber energi yang melimpah aplikasi teknologi mutakhir,

---

<sup>22</sup> Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, (Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005): 17.

kepemimpinan yang baik serta efisien, perhatian terhadap siswa, dan kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut.<sup>23</sup> Maka dari itu SDN 1 Jetis Lor memaksimalkan mutu sekolah melalui peningkatan mutu pendidikan dengan memperhatikan beberapa faktor baik dari kepala sekolah, guru dan wali murid siswa.

Dari hasil mutu pembelajaran tersebut yang didapat oleh siswa SDN 1 Jetis lor ialah menambahnya ilmu pengetahuan, terutama pada penanaman karakter.<sup>24</sup> Selain itu juga banyak penghargaan yang telah diraih selama ini yakni sudah mendapatkannya juara 1 lomba bahasa jawa antar SD sekecamatan, juara 1 lomba Pil Dacil, Juara 2 lomba Mipa dan yang paling utama ialah kualitas pembiayaan pendidikan para pengajar di SDN 1 Jetis Lor lebih terjamin untuk kesejahteraanya.<sup>25</sup>

### C. SINTESIS

---

<sup>23</sup> Ety Rocaety, dkk, "*Istem Informasi Manajemen Pendidikan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2005): 8.

<sup>24</sup> Dian Rahayu, Guru, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, Taman Sekolah, *wawancara*, Tanggal 12 September 2020, Pukul 10.00 WIB.

<sup>25</sup> Sukirno, guru, "Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan", *Observasi*, Tanggal 03 Februari 2020, 08.00 WIB.

Berdasarkan pemaparan diatas, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya, hal ini didasarkan pelaksanaan sendiri yaitu seorang guru, dan tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya, kegiatan tersebut didasarkan pada acuan bagaimana kebutuhan pembiayaan dan mutu bisa berjalan berdampingan. Hal tersebut memerlukan bimbingan dan pengarahan dari semua pelaksanaan kebijakan. Semua golongan dituntut harus bisa mengolah *skill* yang dimiliki. Apabila seorang guru tidak mempunyai *skill* yang diperlukan, maka guru tersebut tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Seperti guru pramuka yang diambilkan dari guru luar. Hal tersebut disebabkan karena tuntutan mutu yang berat, disisi lain pembiayaan sepenuhnya yang dipegang oleh seorang wali murid otomatis tanggung jawab kepada siswa juga lebih besar.

Semua hal tersebut menjadi dilakukan dengan berpedoman sesuai dengan 8 standar mutu, tapi ada standar yang masih kurang menurut peneiliti yaitu, srarana prasarana belum adanya masjid sendiri, praga alat ibdah, serta perlunya tambahan jam mata pelajaran agama tidak hanya satu jam, dikarenakan untuk mengejar sekolah swasta yang menge depankan agama, perlu waktu lebih untuk pelajaran agama, karena semua itu terkupas melalu setandar prasarana yang



mengatakan. Setiap setaun pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi prabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, peralatan pendidik, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pemimpin, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang pemimpin, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel bekerja, ruang unit bengkel produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pada hakikatnya, untuk mendapatkan mutu yang diinginkan indikatornya ialah dapat dijadikan tolak ukur mutupendidikan pada hasil akhir pendidikan misalnya tes tertulis, anakdot,skala sikap.<sup>26</sup> Dalam konsep pendidikan, indikator mutu berpegangpada konteks hasil suatu pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapaioleh sekolah pada kurun waktu tertentu. Sedangkan prestasi yang dicapaidapat

---

<sup>26</sup>Undang-undang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2011.

berupa hasil tes kemampuan akademik atau prestasi non akademik.<sup>27</sup> Karena hal tersebutlah membuat kepala sekolah sangat menekankan siswa SDN 1 Jetis Lor bisa menjadi lulusan yang mempunyai landasan, ketaqwaan, pendidikan dan olahraga. Sesuai dengan visi sekolah mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat dan potensi siswa. Disini terlihat dari peran guru yang melaksanakan pembelajaran tambahan selesai pembelajaran, ekstrakurikuler (hari jum'at dan sabtu) dan ekstrakurikuler pramuka. Semua itu dibingkai sesuai kebijakan yang dilaksanakan untuk mendapatkan mutu pendidikan yang diinginkan. Karena pada dasarnya mutu didukung oleh berbagai komponen: (1) sistem, harus didesain dengan baik oleh guru, dalam proses belajar mengajar harus mengetahui apa saja yang akan dilakukannya, mempelajari, memperbaiki dan menyempurnakan metode dan prosedur, mencatat apa saja yang tela diperoleh, (2) strategi, guru dituntut menguasai berbagai strategi dalam pembelajaran untuk diterapkan pada siswa dalam berbagai kondisi, (3) kepemimpinan, dalam memimpin proses pembelajarannya, (4) evaluasi, evaluasi yang dilakukan oleh guru sangat mendukung teradap perbaikan mutu pembelajaran

---

<sup>27</sup> Subagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya jaya, 2002), 22.

selanjutnya, karena dengan adanya evaluasi, guru bisa mengetahui celah-celah kelemahannya dalam pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung, (5) motivasi yang tinggi akan menjadikan guru yang kreatif dan inovatif.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Ety Rochaety, dkk, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, 8.

## **BAB VI**

### **EVALUASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEH DI SDN 1 JETIS LOR**

#### **A. PAPARAN DATA**

Evaluasi kebijakan pembiayaan yang dilakukan di SDN 1 Jetis Lor disini meliputi dua tahap evaluasi pembelajaran yang pertama evaluasi mingguan dan yang kedua evaluasi tiga bulanan. Evaluasi dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru-guru dan yang kedua komite dengan kepala sekolah, guru dan wali murid . pelaksanaan dilakukan dengan tanggapan guru untuk mingguan dengan agenda rapat rutin kepala sekolah mengikuti kegiatan monitoring setiap minggunya, sedangkan untuk tiga bulanan berdasarkan aspirasi wali murid dan kepala sekolah. Untuk pelaksanaan sudah dijadwalkan pada akhir pekan sedangkan untuk tiga bulanan ditentukan komite setelah selesai ulangan tengah semester.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dian Rahayu, Guru, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, Taman Sekolah, *wawancara*, Tanggal 12 September 2020, Pukul 10.00 WIB.

Dalam kegiatan pembiayaan juga tidak terlepas dari kegiatan eksternal yaitu wali murid, hal itu tidak terlepas dari dana, mungkin ada telat pembayaran, mungkin adanya yang tidak siap dalam membayar di evaluasi tersebut juga dibahas bagaimana solusinya. Disini peneliti menemukan masalah siswa yang semangat dalam belajar akan tetapi disini wali murid kekurangan dalam pembayaran dan terlihat kepala sekolah memberikan keringanan agar siswa tersebut bisa ikut kebijakan tersebut.<sup>2</sup> Disini peran evaluasi digunakan untuk melihat dampak, masalah dan problematika yang ada dan mengapa kebijakan diambil mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijakan.<sup>3</sup>

Peneliti juga meneliti evaluasi yang dilakukan di SDN 1 Jetis Lor . kepala sekolah mengadakan evaluasi rutin terkait pelaksanaan kebijakan. Evaluasi tersebut terkait proses pelaksanaan kebijakan hingga hasil monitoring dari pelaksanaan kebijakan yang ada di sekolah. Peneliti juga menemukan tentang

---

<sup>2</sup> Eri Widiarti, Komite, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, di Taman Sekolah, *wawancara*, tanggal 16 September 2020, Pukul 08.00.

<sup>3</sup> Oemar Hamalik, "*Evaluasi Kurikulum*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990): 22.

pembahasan terkait dampak yang muncul dari pelaksanaan kebijakan pembiayaan tersebut.<sup>4</sup>

Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan kepala sekolah yang menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi kebijakan dilakukan secara rutin dengan berdasar beberapa poin terkait dengan fungsi manajemen dari kebijakan tersebut yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Pihak sekolah selalu melakukan fungsi manajemen dari setiap evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan analisis lembaga dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring ataupun bentuk evaluasi tahap lanjut.<sup>5</sup>

Eri selaku komite menyatakan bahwa:

“evaluasi kebijakan pembiayaan dilakukan berdasarkan hasil feedback dari pembelajaran yang ada. Adapun hasil feedback yang pernah ditemui yaitu terdapat beberapa prestasi yang ada baik ekstrakurikuler ataupun segi akademik. Komite juga mengkomunikasikan pengeluaran dan pemasukan terkait pembiayaan yang ada di lembaga untuk menjaga transparansi dalam pembiayaan”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tri Hardiati, Guru, “Kegiatan Evaluasi Kebijakan Yang Diberikan”, *Observasi*, Tanggal 03Maret 2020, Jam 08.00.

<sup>5</sup> Eri Widiarti, Komite, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, di Taman Sekolah, *wawancara*, tanggal 16 September 2020, Pukul 08.00.

<sup>6</sup> Eri Widiarti, Komite, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, di Taman Sekolah, *wawancara*, tanggal 16 September 2020, Pukul 08.00.

Hal ini didukung dengan hasil dokumentasi tentang pembiayaan yang dibukukan berdasarkan hasil kebijakan pembiayaan yang dibuat oleh lembaga. Dalam buku pembiayaan disebutkan keterangan terkait evaluasi rutin yang ada dengan perbaikan setiap minggu ataupun tiga bulan sekali. Peneliti juga menemukan beberapa analisis kebijakan terkait perumusan kebijakan yang ditinjau dari segi proses, agenda ataupun adopsi kebijakan.<sup>7</sup>

## **B. ANALISIS DATA**

Evaluasi adalah suatu kebijaksanaan yang perlu dilakukan, agar diketahui letak kekurangan, kelebihan, keberhasilan, dan kegagalannya. Evaluasi kebijaksanaan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan ataukah belum. Menurut Sugeng Arianto Evaluasi difungsikan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Tri, Bendahara, Laporan pembiayaan, *Dokumentasi*, Tanggal 3 Februari 2020, 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Dian Rahayu, Guru, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, Taman Sekolah, *wawancara*, Tanggal 12 September 2020, Pukul 10.00 WIB.

Hal tersebut yang mendasari ialah untuk melihat bagaimana hambatan yang dirasakan, oleh berbagai aspek dari, murid, guru hingga wali murid. Menurut Farel dengan padatnya kegiatan di sekolah, maka kegiatan lainnyadilaksanakan setelah jam formal sekolah selesai.<sup>9</sup>Hal itu juga sama halnya dengan Farel "yang menyatakan kendalanya lelah dan rumah jarak jauhakan membuat pulang kami semakin sore". Hal itu juga yang dirasakan dari guru. Menurut Eri Widiarti, "Kendala yang dihadapi pada saat ini ialah karena waktu selesai pembelajaran maka siswa lumayan lelah, dan susah untuk konsentrasi".<sup>10</sup> Kenapa kita mengangkat dampak dari kebijakan tersebut ke arah evaluasi karna menurut pemaparan teori hal tersebut menjadi alasan kita untuk melakukan evaluasi. Selain hal itu, alasan lainnya semisal mengenali seberapa jauh sesuatu rumusan kebijakan sudah bisa diimplementasikan, keberhasilan serta kekurangan penerapan kebijakan akibat dan resiko daripelaksanaan akan mengetahui dari segi mana kekurangan dari kebijakan pembiayaan dalam lembaga tersebut. Seperti yang diungkapkan kepala sekolah evaluasi kebijakan tersebut bahwa:

---

<sup>9</sup> Farel, siswa, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, di Ruang Kelas VI, *wawancara*, tanggal 17 September 2020, Pukul, 07.00 WIB.

<sup>10</sup> Nunik, guru kelas, "Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan", *wawancara*, Tanggal 16 September 2020, 10.00 WIB



“Evaluasi disini dibagi menjadi dua yang pertama, evaluasi mingguan dan yang kedua evaluasi ini dilakukan 3 bulan sekali dengan melihat beberapa penilaian yang di evaluasi, dari mulai hasil. Peningkatan dan masalah yang dihadapi, dan diperbaiki untuk selanjutnya”<sup>11</sup>

Hal tersebut diperkuat Eri menurutnya:

“evaluasi diadakan kepala sekolah kepada guru, menanyakan bagaimana proses perkembangan siswa dilakukan kepala sekolah setiap minggu, untuk bagaimana perkembangan siswa yaitu biasanya 3 bulan sekali.”<sup>12</sup>

Ungkapan tersebut dikupas oleh bapak Sukirno pemaparnya ialah:

“Evaluasi disini dilaksanakan oleh kepala sekolah. Tapi apabila orang tua dan komite ingin mengevaluasi bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diinginkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan yang perlu di evaluasi menurut saya adalah terkait waktu les yang mungkin bisa di rundingkan lagi, mungkin di pagi hari karena kalau melihat siang siswa tingkat konsentrasinya sudah mulai berkurang.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sukirno, Guru, “Perencanaan Kebijakan Pembiayaan Yang Dilakukan”, Ruang Kelas, *Wawancara*, Tanggal 09 September 2020, Pukul 08.00 WIB.

<sup>12</sup> Eri Widiarti, Komite, Perencanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan, di Taman Sekolah, *wawancara*, tanggal 16 September 2020, Pukul 08.00.

<sup>13</sup> Sukirno, Guru, “Perencanaan Kebijakan Pembiayaan Yang Dilakukan”, Ruang Kelas, *Wawancara*, Tanggal 09 September 2020, Pukul 08.00 WIB

Hal tersebut sesuai dengan observasi yang terlihat. Evaluasi kegiatan diperlukan dalam sebuah kebijakan, maka dari itu SDN 1 Jetis Lor melakukan evaluasi rutin untuk mengevaluasi kegiatan tersebut. Evaluasi tersebut dilaksanakan dua bentuk evaluasi, pertama evaluasi yang dilakukan kepala sekola kepada guru dan yang kedua evaluasi yang dilaksanakan dengan orangtua siswa dan komite. Evaluasi kepala sekolah kepada guru dilakukan satu minggu sekali hal ini dilakukan di akhir pekan, kepala sekolah secara serentak menanyakan bagaimana perkembangan peserta didik kepada masing-masing guru kelas, selain itu juga bertanya kepada penanggung jawab masing-masing definisi. Setiap evaluasi tersebut kepala sekolah memberikan masukan atau motivasi untuk penunjang semangat guru dalam memberikan ilmu kepada murid, dan yang terpenting sifat tanggung jawab yang harus selalu dipegang oleh masing-masing guru, karena orang tua sudah memberikan tambahan kesejahteraan yang harus dibayar dengan suntikan ilmu kepada anak didiknya. Kedua adalah evaluasi dengan wali murid, hal ini dilakukan selama tiga bulan sekali, dilakukan dengan agenda rapat komite. Disini kepala sekolah menanyakan kepada orang tua bagaimana perkembangan anak yang dirasakan selama mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini

diperlukan agar kebijakan tersebut dimaksudkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu tercapainya mutu pembelajaran yang diinginkan.<sup>14</sup>

Pemaparan yang dilakukan kepala sekolah tersebut seperti yang diperkuat teori yang ditinjau konstituitasnya, evaluasi kebijakan pendidikan dapat dibedakan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan secara terus-menerus sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan setiap periode.<sup>15</sup> Selain itu juga peneliti juga menemukan kesesuaian data terkait teori yang ada yaitu pelaksanaan evaluasi proses dan dampak secara rutin untuk mengukur tolak ukur perkembangan pelaksanaan kebijakan pembiayaan tersebut.<sup>16</sup>

### C. SINTESIS

Sebuah kebijakan merupakan sebuah evaluasi menjadi hal yang vital untuk melihat bagaimana dalam pembuatan kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini

---

<sup>14</sup> Tri Hardiati, Guru, "Kegiatan Evaluasi Kebijakan Yang Diberikan", *Observasi*, Tanggal 03 Maret 2020, Jam 08.00.

<sup>15</sup> Imron A, "Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia Proses, Produk dan Masa Depan", (Jakarta: Bumi Aksara: 2002): 45.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 46.

terlihat dari evaluasi yang dilakukan dalam kebijakan di SDN 1 Jetis Lor tersebut evaluasi dilakukan melalui dua tahap. Pertama yaitu tahap awal dilakukan satu minggu sekali, dengan mendengarkan aspirasi dari guru kelas menjelaskan bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Hal ini dinyatakan bagaimana proses berjalannya sampai dengan bagaimana perkembangan yang dihadapi. kepala sekolah melakukan monitoring terhadap penanggung jawab masing-masing tugas, apabila ada yang kurang atau hambatan fungsi dari evaluasi ini adalah memberikan solusi dan masukan serta pengawasan supaya kebijakan benar-benar bermanfaat tidak hanya menggugurkan sebuah tanggung jawab. Evaluasi yang kedua ialah pada tiga bulan sekali oleh wali murid, kepala sekolah dan komite. Pada evaluasi ini ialah paparan dari orang tua mengenai peningkatan anak di rumah maksudnya ialah orang tua menanyakan bagaimana perkembangan setelah anak melakukan kebijakan tersebut, disini hal positif baik negatif ditampung, untuk diberikan solusi bagaimana kebijakan tersebut benar-benar layak atau tidak. Fakta ini dilihat dari beberapa tahun terakhir. Kebijakan tersebut sudah menjadi ciri khas lembaga SDN Jetis Lor dibandingkan sekolah lain, yang melatarbelakangi bagaimana sekolah SDN Jetis Lor bersaing dengan sekolah sekolah swasta.

Berdasarkan hasil analisis diatas, seharusnya komite juga ikut aktif dalam memantau pelaksanaan semisal komite ikut serta mengawasi dalam kegiatan tersebut, supaya guru juga dapat sepenuhnya dengan tanggung jawab, dan yang penting ialah bagaimana yang menjadi keluh kesah siswa komite selaku orang tua, tahu yang dirasakan siswa, dan selain itu juga komite harus mempunyai sebuah acuan dalam penilaian sebuah kebijakan sesuai dengan keterangan teori ditinjau dari kriteria evaluasi, digolongkan atas dua golongan, ialah evaluasi yang menggunakan kriterium. Kriterium disini umumnya berupa kriterium mengacu kepada yang sudah terstandar (*standar criterion reference*) dan kriterium yang dibuat berdasarkan acuan norma (*norm criterion reference*). Pertama bararti telah dibuat patokan secara Nasional dan daerah-daerah yang telah melaksanakan kebijakan tersebut harus menjadikannya sebagai patokan. Sedangkan yang kedua lebih menunjuk kepada daerah, apakah suatu daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut berada dibawah atau diatas rata-rata daerah-daerah secara Nasional.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, 22.

## **BAB VII**

### **PENUTUPAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan berdasarkan paparan data dan analisis data tentang Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran study khusus di SDN 1 Jetis Lor, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SDN1 Jetis Lor, perumusan kebijakan pembiayaan yang dilakukan dengan melalui berbagai agenda mulai dari perumusan kebijakan mulai dari agenda kebijakan, formulasi pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Perumusan dimulai penyusunan sebuah agenda yang diawali pada saat kepala sekolah melihat keluhan yang dirasakan guru honorer mengenai pembiayaan yang masih kurang dan terkait dengan mutu pembelajaran siswa yang masih rendah, landasan itulah yang ingin diangkat untuk membuat kebijakan tersebut, formulasi pelaksanaan disinilah komite dan kepala sekolah yang membuat kebijakan pembiayaan dengan sumber daya yang dibebankan kepada orangtua siswa dengan pelaksana

yang dilakukan oleh guru dan tenaga ahli dalam bidang tersebut, selanjutnya ialah pengawasan, pengawasan disini dilakukan oleh kepala sekolah sendiri dengan mengecek bagaimana pelaksanaan berlangsung dan didampingi oleh ketua komite, dan yang terakhir evaluasi kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan dua tahapan yang pertama oleh kepala sekolah yakni satu minggu sekali dan yang kedua dari komite yang dilakukan tiga bulan sekali.

2. Pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SDN 1 Jetis Lor, pelaksanaan disini dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran dan oleh ahli khusus. Hal tersebut dilakukan tambahan jam ajar pada pelajaran yang belum paham, dilakukan pada waktu sepulang sekolah setiap hari senin-kamis ada juga pelajaran membaca tulis al-Qur'an yang dilakukan oleh guru agama, selain itu untuk hari jum'at yaitu ekstrakurikuler pramuka yang dilakukan pada siang hari, untuk ekstrakurikuler pramuka dibebankan kepada seorang ahli pramuka dari pembina kecamatan, dan untuk hari sabtu pengembangan olahraga dan budaya, jadi seorang anak dilatih sesuai kemampuan individu siswa, seperti: voli, sepak bola dan sebagainya, selain itu juga seni budaya dilatih dengan tarian daerah, dan reog ponorogo mini. Melihat itu

semua guru diharuskan aktif melakukan kegiatan tersebut agar guru mendapatkan tambahan pembiayaan dengan harapan siswa terangkat mutu pembelajarannya.

- 3 Evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran yang telah diperoleh di SDN 1 Jetis Lor, Evaluasi kebijakan pembiayaan dalam meningkatkan mutu pembelajarann di SDN 1 Jetis Lor disini dilakukan dengan menggunakan dua tahap evaluasi, yang pertama adalah evaluasi yang dilakukan satu minggu sekali di akhir pekan dengan tahapan evaluasi yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan masing-masing penanggung jawab (guru), kepala sekolah menanyakan tentang perkembangan yang didapat siswa dan bagaimanahambatan yang dilalui, untuk diberikan motivasi oleh guru dan masukan atas hambatan yang diperoleh supaya kebijakan bisa berjalan dengan yang diharapkan, yang kedua evaluasi yang diadakan setiap tiga bulan sekali setelah ulangan tengah semester, evaluasi ini dipimpin oleh komite, dibantu kepala sekolah dengan guru dan wali murid, agenda ini dilakukan dengan pengangkatan atau mendengar aspirasi wali murid mengenai perkembangan anak sewaktu dirumah, apakah ada peningkatan atau tidak, selain itu evaluasi mengenai



pembiayaan bagaimana kekurangan pembayaran, dan faktor evaluasi kebijakan untuk kedepannya.

## **B. SARAN**

Untuk kedepannya kebijakan pembiayaan harus lebih ditingkatkan karena terlihat kebijakan ini benar-benar membantu guru honorer, selain itu juga guru harus lebih mengasah skill dalam membuat kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan bakat siswa, semisal ada kegiatan musik, baik musik tradisional, ataupun musik tradisional. Kenapa disini saya anggap perlu karena terlihat ketika penabuh atau pemukul tarian masih diiringi orang luar, atau dengan kaset, alangkah baiknya kalau siswa yang mengiringi akan terlihat lebih bagus, disisi lain fasilitasnya sudah ada disekolahan hanya saja gurunya yang masih belum menguasai, selain juga kegiatan musik disisi lain mungkin perlu kegiatan tradisional lain semisal pencak silat dikarenakan, untuk menabuh citra sekolahan yang diinginkan kepala sekolah menjadikan sekolah yang ber icon budaya, melihat ikon tersebut yang masih jarang dimiliki sekolah dasar pada umumnya. Karena menurut penulis lebih banyak kegiatan yang dilakukan guru lebih banyak juga peningkatan pembiayaan yang diperoleh, dan utamanya mutu siswa perlahan juga akan terangkat untuk kedepannya.

Untuk pengawasan disini komite harus juga ditekankan semisal satu minggu sekali komite membuat absensi guru dalam kegiatan, hal tersebut diperlukan sebagai pengawasan atau juga sebagai sebuah komitmen karena kegiatan tersebut dasarnya adalah komite yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan tersebut.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### ***Buku:***

- Anissatul Mufarokah, *Strategi Belajar Mengajar*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), Cet.Ke-1.190.
- Donald Ary, Et.al. *Introduction to Research in Education*. Canada: Ceangege Learning, 2010.
- Edward Sallis, *Total Quality Manjemen In Education*, terj., Ahmad Ali Riyadi (Yogyakarta: Ircisod, 2006.
- Ety Rochaety, dkk, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan*

*dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik.*  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

H.M. Sulthon, Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: Pressindo, 2006.

Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Imron, A, *kebijakan Pendidikan Di Indonesia Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara 2012.

Imron, A. 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.

John M. Echolis, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia, 1988) Cet. Ke XVI, 460

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
- M. Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- M.N. Nasution, *Manajemen Mutu terpadu*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Bandung : Al-Ma'arif, 1984.
- Martinis Yamin dan Maisah, *Manajemen Pembelajaran Kelas Strategi Meningkatkan Mutu Pembelajaran*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *analisis Data Kualitatif, Terj. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Morgan, Colin dan Stephen, Murgatroyd. 1994. Total Quality Management in the. Public Sector: An Interactive Perspective* Buckingham: Open University. Press, 1994.

Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.

Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

M.N. Nasution, *Manajemen Mutu terpadu*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Bandung : Al-Ma'arif, 1984.

Martinis Yamin dan Maisah, *Manajemen Pembelajaran Kelas Strategi Meningkatkan Mutu Pembelajaran*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *analisis Data Kualitatif*, Terj. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

*Morgan*, Colin dan Stephen, *Murgatroyd*. 1994. *Total Quality Management in the. Public Sector: An Interactive*

*Perspective* Buckingham: Open University. Press, 1994.

Nanang Fath, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013

Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Joko Subagyo *Metode. Penelitian dalam Teor dan Praktek* .Jakarta: PT Rineka Citra , 2004.

Robert C. Bogdan & S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley, 1975.

Robert C. Bogdan, & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education; An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982.

Soewadji Lazaruih, *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*. Jakarta: Kanisius, 1992.

Subagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*,  
Ardadizya Jaya: Jakarta, 2002.

Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: Bumi  
Aksara, 2007.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan  
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,  
2007.

Sumyang, *Manajemen Produksi dan Operasi dan Operasi*.  
Jakarta: Salemba Empat:

Syaiful Sagala. *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi  
Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai  
Pustaka, 2005.

Undang-undang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan  
Menteri No 19 Tahun 2011.

Usman Husaini, *Manajemen Teori, Praktek, Dan Riset  
Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.



W.S Winkel, *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi, 2004.

Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

***Jurnal:***

Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana & Anak Agung Gede Agung “Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng” *e- Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan*. Volume 6, Nomor 1 Tahun (2015).

Fedyw.e, Pembiayaan Pendidikan, *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, Volume 19 nomer 4, 2013 : 566-567

linan Lampiran Permendikbud No. 66 th 2013 tentang Standar Penilaian

Lincoln & Guba, *Effective Evaluation*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981.

Lofland, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984.

Nurhasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia Kurikulum untuk Abad21: Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-faktor Yang mempengaruhi mutu Pendidikan*. Jakarta: sindo 2004.

Ridha Vironika, *Pembiyayan Pendidikan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan dasar*. Jakarta: Universitas Islam Sultan Agung.

***Internet, website, berita :***

*Detiknews. Revolusi Senin 05 November 2018, 11: 14 WIB*

**IAIN**  
**PONOROGO**

